

DIREKTORAT JENDERAL
PERTERNAKAN & KESEHATAN HEWAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DRAFT **RENCANA STRATEGIS** 2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1	1
1.2	3
1.2.1	5
1.2.2	6
1.2.3	8
1.2.4	11
1.2.5	13
1.3	17
1.3.1	24
1.3.2	27
1.4	30
BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	47
2.1	51
2.2	56
2.3	59
2.4	63
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	82
3.1	69
3.2	80
3.3	84
3.4	85
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	102
4.1	90
4.2	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kontribusi Sektor pertanian (sumber: BPS 2023)	4
Gambar 2. Populasi Ternak (sumber: BPS)	5
Gambar 3. Impor daging sejenis lembu (sapi, kerbau, dan sejenisnya) (sumber BPS)	8
Gambar 4. Dampak PMK bagi sapi, kerbau, domba, kambing dan Babi di Indonesia hingga November 2021	9
Gambar 5. Luas panen dan Produksi jagung nasional	13
Gambar 6. Konsumsi Daging Ayam Ras per Kapita Masyarakat Indonesia (2019-2023)	14
Gambar 7. Capaian IKSP 1	28
Gambar 8. Tren kinerja IKSP 1	29
Gambar 9. Capaian IKSP 2	31
Gambar 10. Tren Kinerja IKSP 2	32
Gambar 11. Capaian IKSP 2	32
Gambar 12. Tren Kinerja IKSP 3	33
Gambar 13. Capaian IKSP 4	34
Gambar 14. Tren Kinerja IKSP 4	35
Gambar 15. Capaian IKSP 5	35
Gambar 16. Tren Kinerja IKSP 5	36
Gambar 17. Capaian IKSP 6	37
Gambar 18. Tren Kinerja IKSP 6	38
Gambar 19. Capaian IKSP 7	38
Gambar 20. Tren Kinerja IKSP 7	39
Gambar 21. Capaian IKSP 8	40
Gambar 22. Tren Kinerja IKSP 8	41
Gambar 23. Capaian IKSP 9	41
Gambar 24. Tren Kinerja IKSP 9	42
Gambar 25. Capaian IKSP 10	43
Gambar 26. Tren Kinerja IKSP 10	44
Gambar 27. Capaian IKSP 11	45

Gambar 28. Tren Kinerja IKSP 11	46
Gambar 29. Pohon kinerja untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 1	60
Gambar 30. Pohon kinerja untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 2 Int.O 2.1, Int.O 2.1.1	61
Gambar 31. Pohon kinerja untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 2 Int.O 2.1, Int.O 2.1.3	66
Gambar 32. Pohon kinerja untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 3	68
Gambar 33. Pohon kinerja untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 5	70
Gambar 34. Pohon kinerja untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 6	74
Gambar 35. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029	83
Gambar 36 Kerangka Strategis Ditjen PKH tahun 20252029	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi ternak 20202022	6
Tabel 2. Produksi komoditas peternakan	6
Tabel 3. Potensi dan Permasalahan Ditjen PKH	17
Tabel 4. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKH Tahun 20252029	80
Tabel 5. Kerangka regulasi Ditjen PKH	97
Tabel 6. Permasalahan terkait SOTK dan Desain kriteria Ditjen PKH	99
Tabel 7. Target Kinerja Ditjen PKH 20252029	102
Tabel 8. Target Kinerja Dit. Perbibitan dan Produksi Ternak 20252029	103
Tabel 9. Target Kinerja Dit. Pakan 20252029	104
Tabel 10. Target Kinerja Dit. Kesehatan Hewan 20252029	104
Tabel 11. Target Kinerja Dit Kesehatan Masyarakat Veteriner 2025-2029	104
Tabel 12. Target Kinerja Dit PPH PKH 20252029	105
Tabel 13. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ditjen PKH 20252029	106

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan dan Kesehatan hewan memiliki peran yang strategis dalam penyediaan pangan dan gizi bagi masyarakat Indonesia. Komoditas peternakan merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, kaya akan vitamin B12, Zat besi, Zinc, Kalsium dan Omega 3 yang sulit diperoleh dari sumber nabati. Dalam ketahanan pangan, komoditas peternakan merupakan penyedia pangan yang stabil sepanjang tahun, menjadi sumber penghasilan peternak dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Selain itu, limbah dari peternakan berupa kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk lahan pertanian atau dijual kembali sebagai produk sampingan yang bernilai jual tinggi.

Kesehatan hewan menjadi aspek yang penting dalam pengelolaan peternakan karena berperan langsung dalam menjaga produktivitas ternak serta mendukung kesehatan masyarakat melalui pengendalian zoonosis dan peningkatan mutu produk hewan. Penyelenggaraan kesehatan hewan yang terpadu dan berkelanjutan, termasuk pencegahan, pengendalian, dan pengobatan penyakit, menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan nasional di pasar domestik maupun internasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang kuat dan mandiri dalam bidang pangan, khususnya di sektor peternakan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Ditjen PKH ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pangan nasional, termasuk di dalamnya adalah sub sektor peternakan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): Renstra Ditjen PKH disusun sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
3. Peraturan Menteri terkait: Berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang penyusunan Renstra dan pengelolaan program dan kegiatan di bidang peternakan menjadi acuan penting dalam penyusunan Renstra Ditjen PKH.

Dalam penyusunan Renstra ini, Ditjen PKH mengacu pada beberapa acuan penting, yaitu:

1. **Visi dan Misi Kementerian Pertanian:** Renstra Ditjen PKH diselaraskan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam pencapaian tujuan bersama.
2. **Analisis SWOT:** Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sektor peternakan menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang tepat.
3. **Hasil Evaluasi Renstra Sebelumnya:** Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Renstra yang baru.
4. **Masukan dari Stakeholder:** Masukan dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, sangat penting untuk memperkaya dan menyempurnakan Renstra.

Penyusunan Renstra Ditjen PKH bertujuan untuk:

1. **Menyusun arah kebijakan:** Renstra ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang peternakan.
2. **Meningkatkan kinerja:** Renstra diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ditjen PKH dalam mencapai target- target yang telah ditetapkan.
3. **Menjamin keberlanjutan:** Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
4. **Meningkatkan koordinasi dan sinergi:** Renstra akan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Ditjen PKH dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan penyusunan Renstra ini, diharapkan Ditjen PKH dapat berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor peternakan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

1.2 Kondisi Umum Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh FAO, sektor peternakan memainkan peran krusial dalam menyediakan pangan, pendapatan, dan mata pencaharian bagi miliaran orang di seluruh dunia. Namun, saat ini sektor peternakan tengah menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan seperti perubahan iklim, penyakit hewan, dan fluktuasi harga pakan telah menjadi sorotan utama di sektor peternakan yang perlu untuk diperhatikan secara khusus. Salah satu tantangan utama yang dihadapi peternakan global adalah **perubahan iklim**. Kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, hal ini berdampak pada ketersediaan pakan, kualitas air, dan kesehatan ternak. Selain itu, **pertumbuhan populasi dunia** juga meningkatkan permintaan akan produk peternakan, sehingga meningkatkan ancaman terhadap sumber daya alam. FAO mencatat adanya peningkatan permintaan produk peternakan seiring pertumbuhan populasi global. Namun, terdapat beberapa kendala terkait produksi yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya

keterbatasan lahan, sumber daya air, dan banyaknya peternak yang tidak menerapkan praktik peternakan berkelanjutan.

Sub sektor peternakan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sektor peternakan berkontribusi sekitar 1,56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai sekitar Rp 325,9 triliun.



Gambar 1. Kontribusi Sektor pertanian (sumber: BPS 2023)

Disamping berkontribusi terhadap PDB, subsektor peternakan juga merupakan salah satu sumber utama protein hewani bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk daging, susu, maupun telur. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan di pedesaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

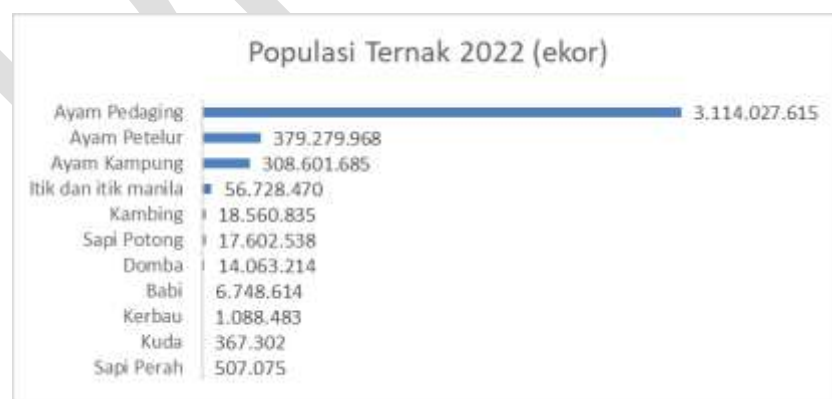
Menurut FAO, peternakan di Indonesia memiliki potensi besar, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti produktivitas yang rendah, ketergantungan pada impor (pakan, daging, susu), dan penyebaran penyakit hewan. Perbandingan dengan kondisi global, Indonesia perlu lebih fokus pada penerapan teknologi peternakan yang tepat guna, pengembangan sistem produksi

yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor peternakan. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Lebih lanjut terkait kondisi peternakan di Indonesia akan dijelaskan dalam beberapa sub bab tersendiri, yaitu:

1.2.1 Populasi

Hewan ternak, seperti kelompok hewan ruminansia merupakan salah satu sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi, dimana hewan seperti kambing, sapi, domba menghasilkan dua dari tiga nutrisi utama yang diperlukan oleh manusia, yaitu protein dan lipid. Di Indonesia sendiri populasi ruminansia cukup tinggi, dan konsumsi dagingnya diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2022, populasi ternak di Indonesia tercatat didominasi oleh komoditas unggas dengan rincian sebagai berikut: komoditas dengan populasi terbanyak adalah ayam pedaging, yaitu sekitar 3,1 Miliar ekor, ayam petelur sebanyak 379 juta ekor, dan ayam kampung sebanyak 308 juta ekor serta itik dan itik manila sebanyak 56 juta ekor. Lebih detail terkait populasi ternak di Indonesia dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:



Gambar 2. Populasi Ternak (sumber: BPS)

Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, populasi sapi perah, kuda, kerbau, babi, domba, sapi potong, kambing dan ayam petelur di Indonesia

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, penurunan yang signifikan terjadi pada komoditas sapi perah, kuda, kerbau, babi domba, sapi potong dan kambing.

Tabel 1. Populasi ternak 2020-2022

Jenis	2020	2021	2022	Grafik
Sapi Perah	568.000	582.169	507.075	
Kuda	384.109	382.014	367.302	
Kerbau	1.154.226	1.143.189	1.088.483	
Babi	7.622.724	7.178.088	6.748.614	
Domba	17.523.689	15.636.251	14.063.214	
Sapi Potong	17.440.393	17.977.214	17.602.538	
Kambing	18.689.711	18.904.347	18.560.835	
Itik dan itik manila	56.569.977	56.569.983	56.728.470	
Ayam Kampung	305.444.937	306.391.596	308.601.685	
Ayam Petelur	345.086.862	386.125.709	379.279.968	
Ayam Pedaging	2.915.536.631	2.889.207.954	3.114.027.615	

Penurunan populasi ini terjadi akibat terjadinya *outbreak* wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada awal April tahun 2022. Wabah PMK tersebut mengakibatkan penyakit dan kematian massal pada ternak ruminansia yang terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Namun, penurunan populasi tersebut tidak signifikan mempengaruhi populasi total masing masing komoditas.

1.2.2 Produksi

Berdasarkan data dari BPS, Produksi daging, telur dan susu nasional pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Produksi komoditas peternakan

Komoditas	2021	2022	2023	Grafik
Produksi Telur Ayam Petelur (Ton)	5.155.997,65	5.566.339,44	6.117.905,40	
Produksi Susu Segar (Ton)	946.388,17	824.273,20	837.223,20	
Produksi Daging Sapi (Ton)	487.802,21	498.923,14	503.506,80	
Produksi Telur Ayam Buras (Ton)	368.696,47	389.271,80	388.461,90	
Produksi Daging Ayam Ras Petelur (Ton)	159.388,47	162.914,30	165.874,20	
Produksi Daging Babi (Ton)	260.852,15	151.885,60	154.351,80	
Produksi Susu Perusahaan Sapi Perah	133.166,32	121.993,87	123.903,80	
Produksi Daging Kambing (Ton)	59.730,15	60.768,70	61.315,40	
Produksi Daging Domba (Ton)	50.702,06	52.162,30	52.998,80	
Produksi Daging Itik/Itik Manila (Ton)	45.681,21	49.291,90	49.267,40	
Produksi Daging Kerbau (Ton)	18.941,73	21.120,15	22.110,80	

Komoditas sub peternakan dengan produksi tertinggi di Indonesia adalah telur. Produksi telur (ayam kampung, ayam petelur, itik) nasional pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 6,8 miliar ton, dengan sebagian besar produksi berasal dari ayam ras petelur (6,1 Miliar ton), meningkat 9,91% dari tahun sebelumnya. Tabel di atas juga menunjukkan produksi beberapa komoditas peternakan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni tahun 2021-2023. Terdapat tiga komoditas yang mengalami penurunan produksi, yaitu: susu segar, daging babi, dan susu perusahaan sapi perah yang terjadi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh munculnya wabah PMK dan munculnya virus African Swine fever (ASF) yang menyerang ternak babi di tahun tersebut. Wabah PMK yang menyerang ternak ruminansia menyebabkan kematian dan penurunan populasi serta produksi pada ternak, dalam hal ini adalah produksi susu oleh sapi yang terjangkit PMK. Hal ini menyebabkan penurunan produksi susu yang cukup signifikan, baik produksi susu segar, maupun produksi susu dari perusahaan sapi perah.

Sama halnya dengan PMK yang menyerang ternak ruminansia, African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Afrika merupakan penyakit yang sangat menular dan mematikan pada babi. Virus ASF telah menjadi ancaman serius bagi industri peternakan babi di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia telah mengalami beberapa kasus wabah ASF dalam beberapa tahun terakhir. Wabah ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak babi, terutama di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi babi. Wabah ASF ini juga menyebabkan kematian massal yang berdampak pada penurunan populasi dan produksi pada ternak babi.

Selain menunjukkan penurunan produksi pada komoditas susu sapi dan ternak babi, tabel di atas juga menunjukkan peningkatan produksi pada komoditas telur ayam, daging sapi, kambing, domba, dan daging kerbau. Namun, meskipun terjadi peningkatan produksi pada beberapa jenis

komoditas ternak, Indonesia masih mengimpor daging sapi dan susu untuk memenuhi permintaan domestik.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2023 Indonesia mengimpor daging sejenis lembu (sapi, kerbau, dan sejenisnya) sebanyak 238,43 ribu ton dengan nilai US\$834,27 juta.



Gambar 3. Impor daging sejenis lembu (sapi, kerbau, dan sejenisnya)
(sumber BPS)

Australia menjadi pemasok daging terbesar ke Indonesia pada tahun 2023, dengan volume 112,6 ribu ton atau 47,22% dari total impor nasional. Nilai impor daging dari negara tersebut mencapai US\$348,84 juta. Di posisi kedua, pemasok daging nasional berasal dari India dengan volume 104,2 ton (US\$375 juta) dan Brasil dengan volume 12,3 ton (US\$71,16 juta).

Produksi susu segar pada tahun 2023 mencapai sekitar 837,22 ribu ton, namun masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi susu dalam negeri yang mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun, sehingga sebagian besar kebutuhan susu masih dipenuhi melalui impor.

1.2.3 Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kasus penyakit hewan menular tetap menjadi tantangan utama bagi peternakan nasional. Menurut data dari Kementerian Pertanian dan BPS, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi pada tahun 2021-2023

telah berdampak signifikan, dengan lebih dari 500 ribu kasus yang dilaporkan, menyebabkan ribuan hewan harus dimusnahkan untuk mengendalikan penyebaran. Hal ini tentunya berdampak terhadap produksi ternak yang dihasilkan, dimana terjadi penurunan produksi ternak yang berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri.



Gambar 4. Dampak PMK bagi sapi, kerbau, domba, kambing dan Babi di Indonesia hingga November 2021

(sumber: <https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id/>)

Berdasarkan data dari *crisis center* PMK (<https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id/>), dapat dilihat bahwa hingga 13 November 2021, ternak sapi potong terdampak PMK sebanyak 469.132 ekor sakit dan 413.779 ekor sudah sembuh dari PMK dan menyisakan 44.116 ekor yang masih belum sembuh. Sapi potong merupakan ternak yang paling signifikan terdampak PMK. Selain sapi potong, gambar 4 diatas juga menyajikan dampak PMK bagi kerbau, domba, kambing dan Babi. Walaupun berbagai upaya vaksinasi dan pengendalian lalu lintas ternak telah dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi, namun hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari PMK.

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan). Sedangkan Kesejahteraan Hewan merupakan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan).

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan salah satu arah strategis yang akan dilakukan Kementerian Pertanian sebagai bentuk kontribusi Kementerian Pertanian terhadap Kesehatan Masyarakat Indonesia, khususnya dari dampak penyakit hewan dan produk hewan bagi kesehatan manusia. Zoonosis atau penyakit hewan yang menular kepada manusia menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya dari penyakit hewan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Sebesar 60% penyakit yang menginfeksi manusia itu berasal dari binatang, dan sekitar 75% berupa infeksi baru. Beberapa penyakit baru tersebut menimbulkan wabah dan pandemi dan salah satunya adalah COVID19”. Terdapat beberapa penyakit hewan menular kepada manusia yang perlu menjadi perhatian bersama, karena berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit hewan tersebut diantaranya adalah Rabies, Antraks, Leptospirosis, Brucellosis dan lain lain. Menurut World Health Organization (WHO) dalam www.who.int, pada Januari-Juli 2024, data publik menunjukkan 71 orang Indonesia meninggal karena rabies. Di antara 26 provinsi endemis rabies di Indonesia, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah yang paling terdampak, dengan laporan 19.320 kasus gigitan hewan yang berpotensi rabies pada manusia selama tahun 2023. Hal ini mengakibatkan

35 kematian akibat rabies. Dari Januari hingga Juli 2024, NTT melaporkan 16.180 kasus gigitan hewan yang berpotensi rabies dan 27 kematian akibat rabies. Kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan menjadi penting untuk dibangun dalam mengantisipasi penularan penyakit hewan kepada manusia yang dapat berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Selain zoonosis, penyakit hewan yang berdampak kepada manusia juga dapat ditularkan melalui produk hewan yang dikonsumsi manusia. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap keamanan pangan dan berdampak langsung terhadap kesehatan manusia.

1.2.4 Ketersediaan dan Distribusi Pakan

Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya peternakan. Kekurangan pakan akan mengakibatkan kurangnya asupan energi, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan ternak. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan yang melambat, bobot badan yang tidak ideal (kurus), gangguan metabolisme dan penurunan daya tahan tubuh/kekebalan terhadap penyakit, serta fertilitas yang menurun. Hal ini tentunya akan mempengaruhi populasi dan produksi ternak.

Disamping ketersediaan pakan, mutu dari pakan juga harus menjadi perhatian. Pakan yang tidak bermutu akan menyebabkan Selain kuantitas yang berkurang, kualitas produk ternak juga akan menurun. Misalnya, susu akan memiliki kandungan lemak dan protein yang rendah, telur akan berukuran kecil dan memiliki cangkang yang tipis, serta mutu daging yang kurang bergizi.

Sumber pakan ternak di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, serta jenis ternak yang dipelihara. Secara umum, sumber pakan ternak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu: pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Pakan hijauan kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang sangat

dibutuhkan oleh ternak untuk pertumbuhan dan produksi. Pakan konsentrat merupakan pakan tambahan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein ternak. Pakan konsentrat biasanya berupa biji bijian, bungkil, dan produk sampingan pertanian.

Sumber pakan ternak di Indonesia umumnya berasal dari tanaman pertanian, seperti jagung, kedelai, dan rumput rumputan. Hal ini menyebabkan ketersediaan pakan sangat tergantung dengan faktor musim, terutama pakan hijauan. Ketersediaan pakan akan melimpah pada musim hujan dan akan menjadi terbatas pada musim kemarau (akibat kekurangan air). Oleh sebab itu ketergantungan pada bahan pakan impor masih tinggi, terutama untuk sumber protein. Ketersediaan pakan ternak, terutama jagung sebagai komponen utama pakan unggas, sangat dipengaruhi oleh produksi dalam negeri dan impor.

Menurut BPS, Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2024 diperkirakan sebesar 15,21 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 0,43 juta ton atau 2,93% dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 14,77 juta ton. Adapun Luas panen jagung pipilan pada 2024 diperkirakan sebesar 2,58 juta hektare, mengalami peningkatan sebanyak 0,11 juta hektare atau 4,34 persen dibandingkan luas panen pada 2023 yang sebesar 2,48 juta hektare. Namun, walaupun terjadi peningkatan luas panen dan produksi, terjadi penurunan pada produktivitas jagung. Pada tahun 2023 produktivitas jagung nasional sebesar 59,67 ku/ha, turun sebesar 1,36% pada tahun 2024 menjadi 58,86 ku/ha. Lebih jelas terkait produksi jagung nasional pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Luas panen dan Produksi jagung nasional

1.2.5 Pengolahan dan Distribusi Produk Peternakan

Pengolahan dan distribusi produk peternakan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk-produk berbasis hewani seperti daging, susu, telur, dan olahannya. Seiring dengan

pertumbuhan populasi dan kesadaran akan gizi, konsumsi produk peternakan seperti daging ayam dan telur terus meningkat.

Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dikutip dari databoks, pada 2023 rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging ayam ras 7,46 kilogram/kapita/tahun. Level konsumsi tersebut meningkat 4,3% dibanding 2022 (*year on year/yoy*), serta menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir seperti terlihat pada grafik di bawah.



Gambar 6. Konsumsi Daging Ayam Ras per Kapita Masyarakat Indonesia (2019-2023)

Adapun total kebutuhan daging ayam ras untuk konsumsi rumah tangga nasional pada 2023 mencapai 2,08 juta ton/tahun, naik 5,4% (yoy). Bapanas juga mencatat, pada 2023 rata-rata masyarakat Indonesia mendapat asupan kalori dari konsumsi daging ayam/unggas lainnya sekitar 76 kilo kalori/kapita/hari. Angka tersebut setara 3,6% dari total asupan kalori harian masyarakat yang rata-ratanya 2.088 kilo kalori/kapita/hari.

Salah satu faktor kunci dalam perkembangan ini adalah modernisasi rantai pasok. Banyak perusahaan peternakan besar telah mengadopsi teknologi *cold chain* (rantai dingin) untuk menjaga kualitas produk, terutama daging dan susu, selama proses distribusi. Sistem logistik berbasis digital juga semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mendistribusikan produk ke daerah-daerah terpencil yang infrastrukturnya belum memadai. Pemerintah dan swasta berupaya mengatasi hal ini melalui program pembangunan gudang pendingin dan kerja sama dengan UMKM lokal.

Di sektor susu, produksi susu segar dalam negeri belum mencukupi permintaan. Selama ini, sekitar 80 persen pasokan susu Indonesia dipenuhi dari impor dengan Selandia baru dan Amerika Serikat menjadi negara importir susu terbesar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan impor susu Indonesia selama Januari hingga November 2024 menurun 6,19 persen dari periode yang sama tahun lalu. Nilai impor susu Indonesia sebesar US\$ 803,4 juta.

Meskipun produksi susu segar dalam negeri belum mencukupi permintaan, industri pengolahan susu lokal terus berkembang. Produk olahan susu seperti yoghurt, keju, dan susu UHT semakin populer di pasar domestik. Indonesia masih mengimpor susu dalam jumlah besar, tetapi upaya untuk meningkatkan produksi lokal terus dilakukan, termasuk melalui peningkatan kualitas peternakan sapi perah.

Regulasi dan standar mutu juga menjadi fokus penting dalam industri peternakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertanian aktif melakukan pengawasan terhadap produk produk peternakan untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Selain itu, sertifikasi halal menjadi prioritas mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini mendorong banyak produsen untuk memastikan produk mereka memenuhi standar halal.

Industri olahan daging, seperti sosis, *nugget*, dan bakso, juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Banyak UMKM yang bergerak di bidang ini mulai mengadopsi teknologi pengolahan modern untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Pandemi COVID19 sempat mengganggu rantai pasok produk peternakan, tetapi sektor ini menunjukkan ketahanan yang baik dengan cepat pulih dan beradaptasi melalui penjualan *online* dan layanan pengiriman.

Isu lingkungan dan kesejahteraan hewan semakin menjadi perhatian dalam industri peternakan. Banyak perusahaan mulai menerapkan praktik peternakan berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi biogas dari limbah peternakan untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, Indonesia mulai meningkatkan ekspor produk peternakan, terutama olahan daging ayam dan telur, ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar internasional.

Peran teknologi digital juga semakin penting dalam distribusi produk peternakan. *Platform ecommerce* dan aplikasi pengiriman makanan *online* memainkan peran kunci dalam mendistribusikan produk ke konsumen, terutama di perkotaan. Peternak juga sudah mulai memanfaatkan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)* untuk memantau kesehatan hewan dan meningkatkan produktivitas.

Secara keseluruhan, pengolahan dan distribusi produk peternakan di Indonesia terus berkembang dengan dukungan teknologi, regulasi, dan inovasi. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur dan pemenuhan permintaan domestik, sektor ini memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih lanjut, terutama dengan dukungan pemerintah dan swasta. Disamping itu, Dengan peningkatan konsumsi daging, susu, dan telur yang terus tumbuh rata-rata 56% per tahun, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Investasi dalam

teknologi peternakan, seperti sistem pemeliharaan intensif dan modernisasi rantai pasok, serta program peningkatan kesejahteraan hewan, menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi sektor ini. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional dalam pengendalian penyakit hewan menular juga menjadi penting untuk menjaga stabilitas produksi ternak di masa depan.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PKH 2025-2029, diperlukan analisis mendalam terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Analisis potensi dan permasalahan dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen PKH. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan serta tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan nasional. Dengan memahami kondisi eksisting, tren global, serta dinamika kebijakan yang berkembang, Ditjen PKH dapat merumuskan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan sektor peternakan yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.3.1. Potensi

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

1. Adanya bonus demografi
2. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia
3. Keragaman genetika peternakan dan ragam pangan olahan
4. Sinergi dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia
5. Kesadaran global tentang keamanan pangan, *biosecurity* dan kesejahteraan hewan.
6. Peningkatan kebutuhan protein hewani asal ternak

1.3.2 Permasalahan

1. Penurunan produksi dan produktivitas ternak yang tertular penyakit hewan
2. Ancaman kesehatan manusia oleh penyakit hewan yang bersifat zoonosis
3. Pangsa pasar peternakan menurun akibat adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
4. Usaha peternakan yang bersifat subsisten dan rendahnya partisipasi kelembagaan peternak (SOUT, 2017)
5. Penurunan Jumlah rumah tangga peternakan dari 13,5 juta Rumah Tangga (RT) pada tahun 2018 menjadi 12,04 juta Rumah Tangga (RT) menurut Sensus Pertanian (ST) tahun 2023.
6. Meningkatnya impor komoditas peternakan
7. Perubahan iklim global menyebabkan penurunan produktivitas ternak

Berikut adalah potensi dan permasalahan terkait peternakan dan kesehatan hewan nasional:

Tabel 3. Potensi dan Permasalahan Ditjen PKH

No	Fakta Eksternal	Dampak terhadap Kementan	Dampak terhadap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	O/T
1	Muncul dan menyebarnya wabah penyakit hewan menular dan zoonosis (menular dari hewan ke hewan lainnya dan ke manusia) seperti Penyakit mulut dan kuku (PMK), African Swine Fever (ASF), flu burung, monkeypox, rabies, dll.	Penyakit hewan menular yang menyebabkan kematian pada hewan ternak tersebut memiliki dampak menurunkan produktivitas hewan ternak dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak	Perlu untuk menyusun rencana aksi mengendalikan penyakit hewan menular dan mencegah penyebarannya.	O
			Meningkatkan kemampuan sistem pengawasan (<i>surveillance system</i>) terhadap penyakit hewan menular	O
			Penurunan populasi dan produktivitas pada ternak yang tertular penyakit hewan	T
		Penyakit hewan tersebut dapat ditularkan kepada	Memperkuat sistem ketahanan dan kesehatan	O

No	Fakta Eksternal	Dampak terhadap Kementan	Dampak terhadap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	O/T
		hewan dan manusia yang dapat mengancam Kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan, serta berpotensi menyebabkan masuknya penyakit zoonosis (jika hewan tertular penyakit non zoonosis)	hewan dan meningkatkan biosekuriti.	
			Melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait zoonosis atau penyakit hewan yang dapat menular ke manusia	O
			Penyakit hewan yang bersifat zoonosis mengancam kesehatan dan nyawa manusia	T
2	Resistensi antimikroba pada hewan terus meningkat	Resistensi hewan ternak terhadap antimikroba akan mempersulit dalam melakukan pengobatan terhadap penyakit hewan	Peningkatan biaya pengobatan ternak dan kematian terhadap hewan ternak	T
		Pemberian obat antimikroba yang tidak bijak (<i>prudent use</i>) terhadap hewan juga dapat berpotensi menyebabkan resistensi antimikroba terhadap manusia	Peningkatan biaya pengobatan manusia dan berpotensi menyebabkan kematian terhadap manusia (dalam waktu yang lama)	T
			Meningkatkan kemampuan sistem pengawasan (<i>surveillance system</i>) terhadap produk hewan	T
			Meningkatkan kemampuan sistem pengawasan (<i>surveillance system</i>) terhadap penggunaan dan peredaran obat hewan/antibiotik untuk hewan konsumsi	T
			Melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran <i>stakeholder</i> terkait resistensi antimikroba	O
3	Keamanan pangan asal hewan: Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan	Potensi terjadinya <i>outbreak</i> penyakit bawaan makanan (<i>foodborne illness</i>) di yang terjadi di masyarakat	Ditjen PKH perlu untuk memiliki/meningkatkan kemampuan sistem pengawasan, monitoring, dan	T

No	Fakta Eksternal	Dampak terhadap Kementan	Dampak terhadap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	O/T
	tertinggi ke2 mengalami penyakit bawaan pangan (<i>foodborne illness</i>)		<i>surveillance</i> keamanan produk hewan agar dapat segera merespons jika terjadi <i>outbreak</i> dari penyakit bawaan pangan (segar asal hewan)	
			Melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan pangan segar asal hewan dan olahan	O
		Faktor keamanan pangan merupakan syarat mutlak untuk melakukan ekspor/impor produk asal hewan	Memastikan produk asal hewan yang akan masuk ke Indonesia (impor) memenuhi persyaratan keamanan produk hewan	O
			Memastikan produk asal hewan nasional memenuhi persyaratan keamanan untuk ekspor produk hewan	T
4	Terjadinya <i>outbreak</i> Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia pada tahun 2022	- Indonesia menjadi negara endemi PMK □ Status 'negara bebas PMK di mana vaksinasi tidak dilakukan' yang dimiliki Indonesia sejak tahun 1986 ditangguhkan sejak April 2022 - Meningkatnya impor produk asing ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional - Ekspor daging dari Indonesia terganggu/terhambat - penurunan populasi ternak, dan produksi serta produktivitas - Menghambat program pemerintah - merugikan peternak secara finansial □	Menerapkan program pengendalian dan penanggulangan PMK □ vaksinasi, penerapan biosekuriti, melakukan <i>surveillance</i> yang lebih masif dan luas, dan sebagainya	T
			Perubahan struktur anggaran □ penyediaan anggaran untuk fokus penanganan dan penanggulangan wabah PMK	T
			Program yang sudah direncanakan menjadi terganggu □ <i>refocusing</i> program	T
			Melakukan penandaan dan pendataan ternak	O

No	Fakta Eksternal	Dampak terhadap Kementan	Dampak terhadap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	O/T
		memberikan bantuan kepada peternak		
5	Kesadaran masyarakat semakin meningkat terkait mutu dan keamanan pangan (<i>food safety</i>)	Terjadinya peningkatan kebutuhan akan produk asal ternak yang aman	Memenuhi permintaan konsumen terhadap produk pangan asal hewan yang aman semakin meningkat	O
			Menerapkan praktik pembibitan dan budidaya ternak yang baik (GBP/GFP)	O
			Menerapkan penjaminan kesehatan hewan, mutu dan keamanan produk hewan	O
6	Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang sedang berlangsung mengakibatkan perubahan pola cuaca yang tidak menentu, peningkatan suhu dan curah hujan ekstrem	Perubahan iklim dapat meningkatkan biaya produksi ternak dan menurunkan produktivitas	Ditjen PKH perlu mengembangkan strategi untuk membantu peternak beradaptasi dengan perubahan iklim.	T
			Perubahan iklim juga dapat menyebabkan stres pada hewan dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit	T
			Perubahan iklim menyebabkan peningkatan virulensi (keganasan) agen penyebab penyakit dan <i>vector</i> pembawa penyakit.	T
			Penurunan produktivitas Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan sumber pakan ternak lainnya	T
7	Kondisi geografis Indonesia yang berpotensi terjadinya bencana alam	Penurunan populasi dan produktivitas ternak	Perubahan struktur anggaran □ penyediaan anggaran untuk fokus penanganan dan penanggulangan dampak bencana alam terhadap ternak	T
8	Program:	Peningkatan kebutuhan sumber pangan asal ternak (daging, telur, dan susu)	Peningkatan produksi sumber pangan bergizi asal ternak (daging, telur, susu, dll)	O

No	Fakta Eksternal	Dampak terhadap Kementan	Dampak terhadap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	O/T
	Program minum susu dan makan bergizi untuk anak sekolah, serta ibu hamil		Peningkatan produktivitas ternak penghasil daging, telur, susu, dll.	O
			Peningkatan nilai tambah produk asal ternak	O
			Penjaminan mutu dan keamanan produk asal ternak	O
		Potensi impor susu dan daging akibat produksi dalam negeri yang tidak mencukupi	Penyediaan susu dan daging untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penambahan populasi	O
9	Program Kerja: Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan , perikanan, dan kelautan	Peningkatan produksi komoditas peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan peternak	Peningkatan produksi komoditas peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan peternak	O
		Peningkatan kebutuhan produk olahan asal peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam meningkatkan NTP	Peningkatan kebutuhan produk olahan dari peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam meningkatkan NTP	O
10	Adanya kebijakan satu data nasional dimana sudah ditentukan wali data untuk setiap sektor, namun acuan data pertanian nasional masih menggunakan data BPS yang memiliki perbedaan metode pengambilan data untuk beberapa komoditas	Kementan menjadi wali data sektor pertanian, namun acuan data pertanian dan peternakan nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan data dari Kementan	Berkoordinasi dengan BPS terkait penyediaan data peternakan nasional	T
11	Program Kerja: Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN <i>holding</i> pangan ID FOOD, menjamin harga	Penerapan peternakan berkelanjutan (termasuk SDM dan kelembagaan)	Penerapan prinsip GBP dan GFP	O
			Jaminan usaha di bidang peternakan dari hulu ke hilir	O

No	Fakta Eksternal	Dampak terhadap Kementan	Dampak terhadap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	O/T
	pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen	Menjamin ketersediaan dan akses pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan	Menjamin ketersediaan dan akses pangan produk asal hewan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan	T
			Optimasi skala usaha dan efisiensi (termasuk mengurangi <i>loss</i>) di bidang peternakan	O
12	Program Kerja: Memperpendek rantai distribusi hasil hasil pertanian	Efisiensi dalam sistem pertanian dengan mengurangi jumlah perantara antara petani dan konsumen akhir. Hal ini dapat mengurangi biaya logistik, transportasi, dan penyimpanan yang biasanya dikeluarkan dalam rantai distribusi Panjang	Potensi rantai distribusi hasil hasil peternakan dapat dipangkas sehingga meningkatkan harga jual produk hasil peternakan di Tingkat peternak/produsen	O
			Potensi konflik atau protes dari <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam rantai distribusi produk peternakan saat ini	T
			Meningkatkan koordinasi dengan satgas pangan dan Kemendag untuk meningkatkan pengawasan	O
			Menerapkan hilirisasi di Tingkat peternak untuk menghasilkan nilai tambah pada produk hasil peternakan	O
13	Program kerja: Memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi	Optimasi sistem pemasaran sektor peternakan melalui inovasi teknologi	Optimasi sistem pemasaran sektor peternakan melalui inovasi teknologi	O
			Penguatan kelembagaan peternak dan kelembagaan pasar	O
14	Ketergantungan impor beberapa komoditas peternakan masih cukup besar	Produk peternakan lokal kalah saing dengan produk peternakan impor yang relatif lebih murah	Produk peternakan lokal kalah saing dengan produk peternakan impor yang relatif lebih murah	T
			Peningkatan efisiensi sektor peternakan substitusi impor	O

No	Fakta Eksternal	Dampak terhadap Kementan	Dampak terhadap Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	O/T
			Pengendalian impor melalui SPS dan TBT sesuai dengan peraturan WTO	O
			Meningkatkan investasi usaha peternakan untuk meningkatkan produksi produk substitusi impor	O
			Menurunkan minat dan partisipasi berusaha di bidang peternakan	T
15	Tren integrasi teknologi bidang peternakan dan keswan, seperti: bioteknologi, teknologi mekanisasi, teknologi produksi, sensor Internet of Things (IoT), drone dan berbagai teknologi digital, dll.	Integrasi teknologi bidang peternakan dan keswan modern dapat dimanfaatkan sektor peternakan nasional	Integrasi teknologi bidang peternakan dan keswan dapat dimanfaatkan pada peternakan nasional	O

1.3.1 Potensi

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut adalah potensi yang harus dimanfaatkan sebaik baiknya oleh Ditjen PKH:

1. Melakukan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan

Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan merupakan langkah kritis untuk menjaga kesehatan hewan dan melindungi masyarakat dari zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Penyakit hewan menular seperti **African Swine Fever (ASF)**, **Foot and Mouth Disease (FMD)**, dan **Avian Influenza (AI)** dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, perlu disusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit hewan. Sistem pengawasan (*surveillance system*) yang kuat harus ditingkatkan untuk

mendeteksi dini dan merespon cepat wabah penyakit. Selain itu, penerapan **biosekuriti** yang ketat di peternakan dan integrasi teknologi dalam kesehatan hewan dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem ketahanan dan kesehatan hewan nasional.

2. Melakukan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat serta *stakeholder* terkait kesehatan hewan dan keamanan pangan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan resistensi antimikroba. Masyarakat perlu memahami bahaya **zoonosis** dan cara mencegah penularannya, seperti menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan hewan yang sakit. Selain itu, *stakeholder* di sektor peternakan harus diedukasi tentang bahaya **resistensi antimikroba** akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan segar asal hewan dan olahan juga perlu ditingkatkan untuk melindungi kesehatan konsumen.

3. Menjamin Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Keamanan dan mutu produk hewan adalah faktor penting untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Produk hewan yang diimpor harus memenuhi persyaratan keamanan yang ketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri. Di sisi lain, produk hewan nasional juga harus memenuhi standar keamanan untuk ekspor agar dapat bersaing di pasar global. Penjaminan mutu dan keamanan produk hewan, mulai dari hulu hingga hilir, harus dilakukan secara konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk pangan asal hewan yang aman.

4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak merupakan kunci untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Dengan meningkatkan produksi sumber pangan bergizi seperti daging, telur,

dan susu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Populasi ternak penghasil daging, telur, dan susu perlu ditingkatkan melalui program pembibitan dan budidaya yang baik. Selain itu, investasi di sektor peternakan harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas ternak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

5. Penerapan Praktik Peternakan yang Baik (*Good Breeding/Farming Practices*)

Penerapan praktik peternakan yang baik, seperti *Good Breeding Practices* (GBP) *Good Farming Practices* (GFP) sangat penting untuk menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Praktik ini mencakup manajemen pemeliharaan, pemberian pakan berkualitas, dan penerapan biosekuriti yang ketat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peternak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ternak mereka. Selain itu, jaminan usaha peternakan dari hulu ke hilir harus diperkuat untuk menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan dan efisien.

6. Efisiensi dan Hilirisasi Produk Peternakan

Efisiensi dan hilirisasi produk peternakan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk asal ternak. Dengan memangkas rantai distribusi, harga jual produk di tingkat peternak dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan pendapatan peternak. Hilirisasi produk peternakan, seperti pengolahan daging, susu, dan telur menjadi produk bernilai tambah, juga dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional. Inovasi teknologi dalam sistem pemasaran dan distribusi dapat membantu mengoptimalkan efisiensi sektor peternakan.

7. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Penguatan kelembagaan peternak dan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor

peternakan. Kelembagaan peternak yang kuat dapat membantu peternak kecil mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar. Koordinasi dengan **Satgas Pangan** dan **Kementerian Perdagangan** perlu ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan regulasi di sektor peternakan. Selain itu, peningkatan efisiensi substitusi impor dan pengendalian impor melalui **Sanitary and Phytosanitary (SPS)** dan **Technical Barriers to Trade (TBT)** sesuai peraturan WTO harus dilakukan untuk melindungi peternak lokal.

1.3.2 Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen PKH:

1. Penyakit Hewan dan Zoonosis

Penyakit hewan, terutama yang bersifat zoonosis, menjadi tantangan serius bagi sektor peternakan dan kesehatan masyarakat. Penyakit seperti **Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)** dan **Avian Influenza** tidak hanya menurunkan populasi dan produktivitas ternak tetapi juga mengancam kesehatan manusia. Biaya pengobatan untuk ternak dan manusia yang tertular penyakit ini dapat sangat tinggi, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Perubahan iklim memperparah situasi ini dengan meningkatkan stres pada hewan dan virulensi agen penyakit. Oleh karena itu, program pengendalian penyakit melalui vaksinasi, biosekuriti, dan sistem pengawasan yang masif harus diimplementasikan.

2. Pengawasan dan Regulasi

Sistem pengawasan (*surveillance system*) terhadap produk hewan dan peredaran obat hewan/antibiotik masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keamanan dan mutu produk. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan untuk menyediakan data peternakan yang akurat dan terbaru. Selain itu, penandaan dan pendataan ternak

harus dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pelacakan dan pengendalian penyakit.

3. Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menimbulkan tantangan besar bagi peternakan, seperti penurunan produktivitas Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan peningkatan kerentanan ternak terhadap penyakit. Stres pada hewan akibat cuaca ekstrem dan peningkatan virulensi agen penyakit memerlukan strategi adaptasi yang komprehensif. Penyediaan anggaran khusus untuk penanganan dampak bencana alam terhadap ternak juga menjadi kebutuhan mendesak.

4. Manajemen Anggaran dan Program

Perubahan struktur anggaran untuk fokus pada penanganan wabah penyakit dan dampak bencana alam seringkali mengganggu program program peternakan yang sudah direncanakan. *Refocusing* program diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mengatasi tantangan yang mendesak. Disamping permasalahan terkait refocusing anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat juga sering menjadi tantangan tersendiri untuk Ditjen PKH, seperti kebijakan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak pada pembiayaan program yang telah direncanakan.

5. Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Lokal

Ketahanan pangan produk asal hewan harus dijaga untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Namun, produk peternakan lokal sering kalah saing dengan produk impor yang lebih murah, menyebabkan penurunan minat berusaha di bidang peternakan. Potensi konflik dalam rantai distribusi juga perlu diatasi untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien.

1.3.3 Analisis SWOT

Sebagai bagian dari analisis lingkungan strategis, sektor peternakan Indonesia memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu

diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Kekuatan (Strengths)

1. Ketersediaan sumber daya peternakan yang cukup dan beragam – lahan, pakan, dan ternak yang sesuai dengan berbagai kondisi agroklimat.
2. Keragaman genetika ternak dan ragam pangan olahan yang mendukung diversifikasi produk.
3. Sinergi dukungan peternak, akademisi, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi, inovasi, dan kebijakan.
4. Kesadaran global tentang keamanan pangan, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan.
5. Peningkatan kebutuhan protein hewani asal ternak di masyarakat.
6. Penguatan kelembagaan peternak dan koordinasi antar lembaga.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Penurunan produksi dan produktivitas akibat penyakit hewan menular strategis.
2. Ancaman zoonosis terhadap kesehatan manusia.
3. Ketergantungan pada impor bahan baku pakan dan produk peternakan tertentu.
4. Usaha peternakan yang masih berskala subsisten dengan partisipasi kelembagaan rendah.
5. Penurunan jumlah rumah tangga peternak.
6. Keterbatasan teknologi dan inovasi di tingkat peternak.

Peluang (Opportunities)

1. Bonus demografi yang mendorong permintaan produk peternakan.
2. Peningkatan peluang ekspor produk peternakan.
3. Program pemerintah terkait gizi dan pangan hewani.
4. Integrasi teknologi baru (IoT, bioteknologi, mekanisasi) di sektor peternakan.

5. Penerapan praktik peternakan baik (*Good Breeding Practices/Good Farming Practices*).
6. Hilirisasi dan pengembangan produk olahan bernilai tambah.

Ancaman (Threats)

1. Penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PMK, Avian Influenza, ASF).
2. Resistensi antimikroba pada hewan.
3. Perubahan iklim dan bencana alam.
4. Persaingan produk impor yang lebih murah.
5. Fluktuasi harga pakan dan bahan baku.
6. Konflik dalam rantai distribusi produk peternakan.

1.4 Capaian Renstra Ditjen PKH

Sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Ditjen PKH periode 2020-2024, penting untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih dalam lima tahun terakhir. Analisis capaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan, program, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih adaptif dan responsif dalam Renstra Ditjen PKH periode 2025-2029, guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Analisis capaian Ditjen PKH dilakukan terhadap capaian dari Sasaran Program (SP) dan Indikator Sasaran Program (IKSP) Renstra periode 2020-2024. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing capaian dari masing-masing SP Ditjen PKH:

1. SP 1 IKSP 1



Gambar 7. Capaian IKSP 1

Gambar di atas merupakan grafik kinerja IKSP 1 terkait peningkatan produksi daging yang mencakup sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik dari tahun 2020 hingga 2023. Grafik ini membandingkan target produksi (ditunjukkan dengan warna biru) dan realisasi produksi (ditunjukkan dengan warna oranye) setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, target produksi adalah 0,4 (ribu ton), sedangkan realisasi melebihi target dengan capaian 1,40 (ribu ton). Kinerja meningkat signifikan pada tahun 2021, di mana target hanya 0,85 (ribu ton), tetapi realisasi melonjak hingga 5,59 (ribu ton), menunjukkan pencapaian yang jauh melampaui ekspektasi.

Namun, pada tahun 2022, meskipun target ditetapkan lebih tinggi di angka 7,92, realisasi produksi hanya mencapai 2,39, yang berarti tidak memenuhi target yang diharapkan. Tren serupa terjadi pada tahun 2023, di mana target produksi sebesar 2,82 hanya terealisasi sebesar 1,57.

Secara keseluruhan, pencapaian terbaik terjadi pada tahun 2021, di mana realisasi produksi jauh melebihi target. Sebaliknya, tahun 2022 menunjukkan kesenjangan terbesar antara target dan

realisasi, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mencapai target produksi.



Gambar 8. Tren kinerja IKSP 1

Tren kinerja IKSP 1 dalam peningkatan produksi daging menunjukkan pola naik turun yang signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, capaian produksi mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan capaian yang tetap stabil di angka 120%, menunjukkan bahwa produksi daging mampu melampaui target selama dua tahun berturut turut.

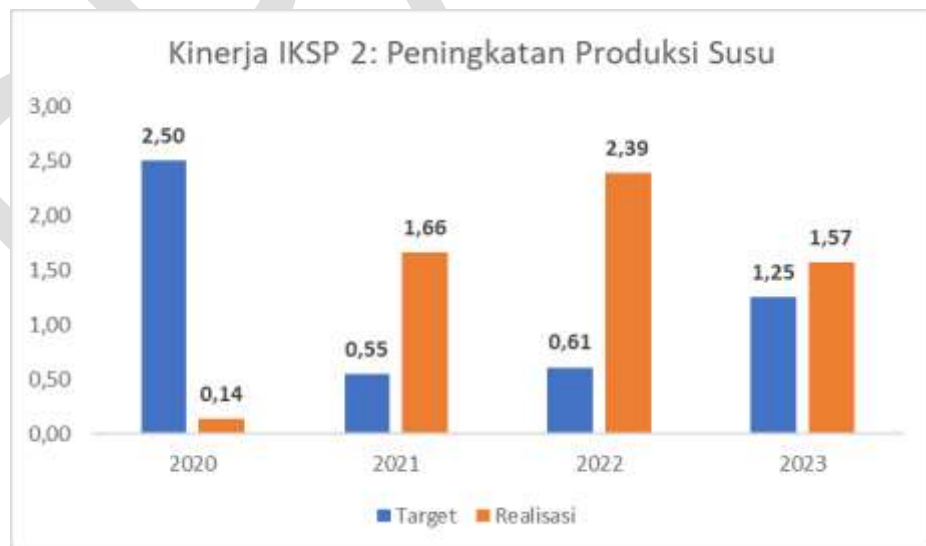
Namun, memasuki tahun 2022, terjadi penurunan drastis dalam capaian produksi. Hanya 30% dari target yang berhasil direalisasikan, menandakan adanya tantangan besar yang menghambat pencapaian yang sebelumnya sangat baik. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, kebijakan, atau hambatan dalam rantai produksi bisa menjadi penyebab penurunan tersebut. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan produksi ini adalah munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak yang berdampak pada banyaknya hewan ternak yang

mati di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini sangat mempengaruhi produksi daging dan susu.

Meski mengalami penurunan tajam pada tahun 2022, kinerja produksi daging mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2023. Capaian meningkat menjadi 55,67%, meskipun masih belum sepenuhnya kembali ke level kejayaan pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem produksi, upaya mitigasi kendala, dan strategi yang lebih baik untuk mencapai target.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan performa yang sangat baik di awal periode, disusul dengan tantangan besar di tahun 2022, dan diakhiri dengan tren pemulihan pada tahun 2023. Hal ini menjadi evaluasi penting dalam pengelolaan produksi daging agar dapat kembali mencapai atau bahkan melampaui target di tahun-tahun mendatang.

2. SP 1 – IKSP 2



Gambar 9. Capaian IKSP 2

Grafik di atas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi peningkatan produksi susu selama periode 2020-2023. Pada

tahun 2020, target produksi susu ditetapkan sebesar 2,50 (ribu ton), namun realisasi yang dicapai hanya 0,14 (ribu ton), menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi produksi susu menjadi 1,66 (ribu ton), melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,55 (ribu ton). Tren positif berlanjut pada tahun 2022, di mana realisasi mencapai 2,39 (ribu ton), jauh melampaui target sebesar 0,61 (ribu ton). Pada tahun 2023, target produksi meningkat menjadi 1,25 (ribu ton), dan realisasi tetap lebih tinggi, yakni 1,57 (ribu ton).



Gambar 10. Tren Kinerja IKSP 2

Grafik di atas menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, tren capaian produksi susu menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah tahun 2020, dengan realisasi yang terus melebihi target sejak tahun 2021.

3. SP 1 – IKSP 3



Gambar 11. Capaian IKSP 2

Grafik ini menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi peningkatan produksi telur selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, target produksi telur ditetapkan sebesar 2,15 (ribu ton), tetapi realisasi jauh melampaui target, mencapai 5,56 (ribu ton). Sebaliknya, pada tahun 2021, realisasi produksi turun drastis menjadi 0,88 (ribu ton), jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 2,15 (ribu ton). Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dalam realisasi produksi telur, mencapai 7,28 (ribu ton), yang melampaui target sebesar 6,46. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi produksi telur meningkat menjadi 8,63 (ribu ton), jauh di atas target yang hanya sebesar 1,51 (ribu ton).



Gambar 12. Tren Kinerja IKSP 3

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam pencapaian produksi telur dari tahun ke tahun. Tahun 2020 dan 2022 menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibandingkan target, sementara tahun 2021 mengalami penurunan signifikan. Namun, pemulihan yang kuat pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan keberhasilan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan produksi telur secara berkelanjutan.

4. SP 2 – IKSP 4



Gambar 13. Capaian IKSP 4

Grafik ini menunjukkan persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebesar 81,50% berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 86,60%. Tahun 2021 menunjukkan tren yang sedikit menurun, di mana realisasi sebesar 84,00% sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 85,20%. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi, yang mencapai 94,00%, jauh melampaui target sebesar 85,50%. Tahun 2023 mempertahankan tren positif, dengan realisasi 91,94% yang juga melampaui target sebesar 85,70%.



Gambar 14. Tren Kinerja IKSP 4

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pencapaian yang konsisten dalam peningkatan keamanan dan mutu pangan segar asal hewan. Meskipun pada tahun 2021 realisasi sedikit di bawah target, capaian tahun-tahun berikutnya menunjukkan perbaikan yang signifikan, mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pangan hewani di Indonesia.

5. SP3 – IKSP 5



Gambar 15. Capaian IKSP 5

Grafik di atas menggambarkan persentase wilayah yang berhasil dikendalikan dari zoonosis selama periode 2020 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebesar 74,00% tidak memiliki data realisasi yang ditampilkan dalam grafik. Hal ini disebabkan indikator tersebut baru mulai berlaku di tahun 2021. Tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dengan realisasi mencapai 88,00%, jauh melampaui target yang hanya sebesar 74,00%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana realisasi sebesar 83,83% kembali melampaui target sebesar 74,50%. Pada tahun 2023, meskipun target dinaikkan menjadi 75,00%, realisasi tetap berhasil melampaui target dengan capaian 80,26%.



Gambar 16. Tren Kinerja IKSP 5

Secara keseluruhan, grafik di atas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam pengendalian zoonosis di berbagai wilayah. Capaian realisasi yang selalu lebih tinggi dari target mengindikasikan efektivitas program dan strategi yang diterapkan dalam upaya mengendalikan penyakit zoonosis di Indonesia.

6. SP4 – IKSP 6



Gambar 17. Capaian IKSP 6

Grafik ini menunjukkan persentase wilayah yang berhasil dikendalikan dari penyakit hewan menular strategis selama periode 2020 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, target pengendalian ditetapkan sebesar 80,00%, dengan realisasi yang hampir sama, yaitu 80,01%. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan, dengan realisasi sebesar 80,74%, melampaui target yang hanya 80,50%. Namun, pada tahun 2022, target dan realisasi stagnan di angka 80,00%, menunjukkan tidak adanya perubahan dalam cakupan wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Tahun 2023 kembali menunjukkan sedikit peningkatan, dengan target 80,50% dan realisasi yang sedikit lebih tinggi, yaitu 80,57%.



Gambar 18. Tren Kinerja IKSP 6

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan stabilitas dalam pengendalian penyakit hewan menular strategis, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2021 dan 2023. Capaian yang mendekati atau melebihi target menunjukkan bahwa program pengendalian telah berjalan sesuai rencana, meskipun ada stagnasi pada tahun 2022 yang mungkin mencerminkan tantangan tertentu dalam implementasi program di lapangan.

7. SP 5 – IKSP 7



Gambar 19. Capaian IKSP 7

Grafik ini menunjukkan tingkat kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, data target dan realisasi tidak ditampilkan dalam grafik. Tahun 2021 mencatat peningkatan signifikan, dengan target sebesar 92,25% dan realisasi yang melampaui target, mencapai 95,86%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, di mana target dinaikkan menjadi 93,50%, tetapi realisasi tetap jauh lebih tinggi, yaitu 96,65%. Pola yang sama terjadi pada tahun 2023, dengan target yang masih di angka 93,50% dan realisasi yang kembali mencapai 96,65%.



Gambar 20. Tren Kinerja IKSP 7

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan keberhasilan yang konsisten dalam meningkatkan pemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan. Setiap tahun, realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas kebijakan dan program dalam meningkatkan fasilitas serta infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

8. SP6 – IKSP 8



Gambar 21. Capaian IKSP 8

Grafik ini menggambarkan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 87,00% tidak tercapai, dengan realisasi hanya mencapai 81,82%. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, dimana realisasi mencapai 90,20%, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,00%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan target sebesar 92,00% dan realisasi yang kembali melampaui target, mencapai 92,59%.



Gambar 22. Tren Kinerja IKSP 8

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya peningkatan kemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2021 target tidak tercapai, perbaikan strategi pada tahun-tahun berikutnya berhasil meningkatkan capaian hingga melampaui target, mencerminkan efektivitas kebijakan dalam pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di Indonesia.

9. SP7 – IKSP 9



Gambar 23. Capaian IKSP 9

Grafik ini menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan ekspor mencapai 29,60%, jauh melampaui target yang hanya sebesar 15,00%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan, di mana realisasi hanya mencapai 8,21%, lebih rendah dari target yang tetap ditetapkan sebesar 15,00%. Penurunan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2022, dengan target pertumbuhan ekspor sebesar 2,00%, tetapi realisasi justru melonjak hingga 13,52%, menunjukkan ketidaktepatan dalam estimasi target. Tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan, dengan target sebesar 5,00% dan realisasi yang sedikit lebih tinggi, yaitu 5,26%.



Gambar 24. Tren Kinerja IKSP 9

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan fluktuasi signifikan dalam pertumbuhan nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan. Tahun 2020 mencatat pencapaian luar biasa, tetapi diikuti dengan penurunan tajam pada 2021. Meski pada 2022 target yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan realisasi, tren 2023 menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang lebih moderat dan mendekati target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja ekspor dari tahun ke tahun, serta perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi dan proyeksi ekspor di masa mendatang.

10. SP8 IKSP 10



Gambar 25. Capaian IKSP 10

Grafik ini menggambarkan nilai **PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)** Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, nilai target dan realisasi berada pada angka yang sama, yaitu **32,30**. Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan, dengan target **32,75** dan realisasi **32,66**, yang hanya sedikit di bawah target yang ditetapkan. Kemajuan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana target yang ditetapkan sebesar **33,50** justru terlampaui dengan realisasi mencapai **35,73**, menunjukkan pencapaian yang jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Namun, pada tahun 2023, target dan realisasi kembali berada pada angka yang sama, yaitu **34,00**, sedikit mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.



Gambar 26. Tren Kinerja IKSP 10

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya tren peningkatan nilai PMPRB dari tahun ke tahun, dengan capaian yang cukup konsisten. Puncak pencapaian terjadi pada tahun 2022, di mana realisasi jauh melampaui target. Namun, tahun 2023 menunjukkan adanya stabilitas nilai PMPRB, dengan target dan realisasi yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah berhasil mempertahankan standar reformasi birokrasi yang telah dicapai, meskipun masih ada potensi peningkatan di tahun-tahun mendatang.

11. SP9 – IKSP11



Gambar 27. Capaian IKSP 11

Grafik ini menunjukkan nilai kinerja anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebesar **88,25** berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai **91,23**, menunjukkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang baik. Tahun 2021 menunjukkan tren serupa, dengan target **88,68** dan realisasi **90,42**, yang kembali melampaui ekspektasi. Tahun 2022 juga mencatat pencapaian yang baik, dengan target **88,93** dan realisasi **90,51**. Namun, pada tahun 2023, meskipun target dinaikkan menjadi **90,32**, realisasi sedikit lebih rendah, yaitu **89,99**, yang berarti tidak sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 28. Tren Kinerja IKSP 11

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan cenderung melampaui target yang ditetapkan, terutama pada periode 2020-2022. Namun, pada tahun 2023, realisasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan target, yang mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran di tahun tersebut. Meskipun demikian, nilai kinerja anggaran tetap berada pada kisaran yang tinggi, mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan eksekusi anggaran secara keseluruhan.

BAB 2

VISI MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1 Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Visi merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN / Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dan merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi serta *positioning* organisasi dalam pembangunan Nasional. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang di dalam RPJMN, sehingga pernyataan Visi K/L harus mencantumkan Visi Presiden sebagai tujuan bersama.

Dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih tahun 2025-2029 serta cita-cita pembangunan nasional tahun 2025-2029, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:

***"Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat
bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas
2045"***

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 20252029 ini bermakna bahwa Pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan jaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 20252029 ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pertanian**

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, **Pertanian** bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

- **Pertanian Maju**

Pertanian yang maju bermakna bahwa Pertanian Indonesia yang akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

- **Pertanian Berkelanjutan**

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan

berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, dalam praktik Pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

- **Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, maka manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
2. Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
3. komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
4. Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I harus dapat turut serta dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 20252029 tersebut. Untuk itu, maka **Visi Ditjen PKH tahun 20252029** yang selaras dengan Visi Kementerian Pertanian tahun 20252029 adalah:

***"Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju,
Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat
Indonesia"***

Visi Ditjen PKH ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pernakan**

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, **Pertanian** bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Berdasarkan definisi ini, maka peternakan merupakan salah satu komoditas dalam pertanian.

- **Kesehatan Hewan**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Kesehatan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Sedangkan hewan didefinisikan sebagai binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

- **Peternakan Maju**

Peternakan yang maju bermakna bahwa Peternakan Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik peternakan terkini pada seluruh rantai proses utama peternakan, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana peternakan, Budidaya ternak berkelanjutan, kesehatan ternak, mutu dan keamanan produk asal ternak, Pasca Panen komoditas Peternakan, Pengolahan komoditas Peternakan, serta Pemasaran komoditas Peternakan.

- **Peternakan Berkelanjutan**

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peternakan merupakan salah satu komoditas, sehingga dalam praktik Peternakan berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya Peternakan berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor Peternakan adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan dalam mengurangi susut pangan asal ternak.

- **Peternakan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

Peternakan yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan Peternakan juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan Peternakan tersebut, maka manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komoditas Peternakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal Peternakan.
2. Peternakan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan peternak.
3. Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

2.2 Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

2. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bermakna bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang

menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

3. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT)

4. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah *monkeypox* (Mpox), Rabies, Anthrax, dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisir dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

5. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang

diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka **Misi Ditjen PKH Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 adalah:**

1. Meningkatkan produksi komoditas peternakan secara berkelanjutan dalam menghasilkan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Misi ini menekankan pada peningkatan produksi ternak dengan sistem budidaya peternakan berkelanjutan agar hasil peternakan dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Budidaya peternakan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Peningkatan produksi dimulai dari pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG), budidaya ternak hingga produksi ternak dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dalam negeri.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi peternak rakyat

Kesejahteraan peternak, khususnya peternak rakyat menjadi prioritas dan muara atas upaya yang dilakukan, baik dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, maupun melalui penyediaan akses terhadap pasar produk peternakan. Hilirisasi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat yang berkeadilan, sehingga taraf hidup peternak rakyat dapat semakin meningkat. Misi ini fokus pada meningkatkan kesejahteraan maupun keadilan peternak rakyat melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, hilirisasi produk peternakan maupun memastikan ketersediaan akses pasar produk peternakan.

3. Menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Misi ketiga adalah Menegakkan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, baik dari pangan asal ternak maupun dari penularan penyakit hewan dan produk hewan kepada manusia. Misi ini menekankan pada pentingnya mutu dan keamanan pangan asal ternak bagi kesehatan manusia. Selain itu, misi ini juga menekankan pencegahan dan penanganan penyakit hewan khususnya yang dapat berdampak kepada kesehatan manusia.

2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi dalam mewujudkan Visi tahun 2025-2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian.

Tujuan 1 Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan volume usaha pertanian dan SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.1: Pertumbuhan volume usaha pertanian
- IT.2: Pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas

2. Tujuan 2: Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas

Tujuan 2 ini adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi

kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkuler dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.3: Indeks swasembada pangan prioritas
- IT.4: Indeks penerapan sistem budi daya pertanian berkelanjutan
- IT.5: Indeks cadangan pangan asal pertanian nasional

3. Tujuan 3: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat

Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.6: Persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku *bio energy*
- IT.7: Pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian
- IT.8: Persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian

4. Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan

Tujuan 4 Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewana, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti *Monkeypox*, Anthrax, Flu Burung, dan lain sebagainya, mempengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan

(IT) 9. Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner

5. Tujuan 5: Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan

(IT) 10. Nilai RB Kementerian Pertanian.

Berdasarkan tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut, maka **tujuan Ditjen PKH tahun 2025-2029 adalah:**

1. **Tujuan 1:** Tujuan 1 Ditjen PKH merupakan lingkup dipersempit dari Tujuan 1 Kementerian Pertanian, yaitu **meningkatkan volume usaha peternakan**. Peningkatan volume usaha peternakan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.1: Indeks Harga yang diterima peternak

2. **Tujuan 2: Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi dalam negeri**

Tujuan 2 adalah Terwujudnya swasembada pangan asal peternakan. Hal ini mengindikasikan bahwa produksi pangan asal ternak prioritas, yaitu daging, susu dan telur, dapat memenuhi minimal 90% kebutuhan daging, telur dan susu masyarakat. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.2: Persentase produksi peternakan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal ternak dalam negeri

3. **Tujuan 3: Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan**

Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 2 (dua) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.2: volume ekspor komoditas peternakan

- IT.3: Indeks hilirisasi komoditas peternakan

4. Tujuan 4: Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan

Tujuan 4 Meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit akibat hewan dan produk hewan. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti *Monkeypox*, *Anthrax*, Flu Burung, dan lain sebagainya, mempengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu: Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Sasaran Program (SP) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional, sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. Sasaran Program terkait Ditjen PKH diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Pertanian pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, dimana Sasaran Program (SP) merupakan kinerja strategis sub sektor yang diturunkan dari kinerja strategis sektor atau *Critical Success Factor* (CSF) dari setiap *final outcome*.

Pohon kinerja Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 terkait Ditjen PKH berdasarkan Final Outcome (FO) dan CSF yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKH Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima Peternak	IKP 1.1	Indeks harga yang diterima Peternak	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41
SP 2	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi dalam negeri	IKP 2.1	Persentase produksi peternak n terhadap kebutuhan pangan prioritas asal peternak n dalam negeri	77,42	78,32	79,18	80,19	81,33
SP 3	Terjaminnya mutu komoditas peternakan	IKP 3.1	Indeks Mutu komoditas peternak n	0,54	0,56	0,58	0,61	0,63
SP 4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	IKP 4.1	Indeks keamanan komoditas peternak n	0,61	0,63	0,66	0,68	0,69
SP 5	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan	IKP 5.1	Volume ekspor komoditas peternak n (ton)	141.759,37	148.641,37	155.858,71	163.425,84	171.360,37
SP 6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 6.1	Indeks hilirisasi komoditas peternak n unggulan	0,2	0,4	0,6	0,8	1
SP 7	Terkendalinya wilayah atau kawasan dari	IKP 7.1	Persentase jumlah wilayah	80	80,3	80,6	80,9	81,2

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	penyakit hewan		atau kawasan yang berstatus bebas atau terkendali dari penyakit hewan terhadap wilayah atau kawasan keseluruhan					
SP 8	Terkendalnya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	IKSP 7.1	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpanan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia	41	41,5	42	42,5	43

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa hasil penerjemahan kinerja pada lampiran di bawah ini:

2.5 Manajemen Risiko Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga perlu dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk

mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Risiko Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Renstra Kementerian Pertanian telah memasukan penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Selanjutnya sebagai unit Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memasukan MRPN dalam Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 dalam bentuk Manajemen Risiko Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerapan manajemen risiko memfokuskan pada risiko yang pencapaian Sasaran Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berikut tabel identifikasi risiko Sasaran Program Ditjen PKH.

No	Sasaran Program	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak	indeks harga yang diterima peternak rendah		
2	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi dalam negeri	Produksi Peternakan menurun		
3	Terjaminnya mutu	Indeks Mutu		

	komoditas peternakan	komoditas peternakan rendah		
4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	Indeks keamanan komoditas peternakan rendah		
5	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan	Volume ekspor komoditas peternakan menurun		
6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan		
7	Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	Persentase jumlah wilayah atau kawasan yang berstatus bebas atau terkendali dari penyakit hewan terhadap wilayah atau kawasan keseluruhan		
8	Terkendalinya wilayah dari zoonosis & penyimpangan produk hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang		

		mempengaruhi kesehatan manusia		
9	Terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen PKH yang baik, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola birokrasi lingkup Ditjen PKH yang baik, transparan, dan akuntabel		

Pemetaan risiko Sasaran Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional dapat dilihat pada lampiran

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan Rencana Teknokratik RPJMN 20252029 dan Visi Misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan perolehan suara terbanyak yang terkait dengan pertanian.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 35. Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029, atap atau tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara sebagai berikut:

1. Pertumbuhan volume usaha pertanian

Kesejahteraan petani bergantung pada 2 (dua) hal yaitu pendapatan dan pengeluaran petani. Pertumbuhan volume usaha petani berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan Petani dimana volume usaha pertanian yang meningkat berkorelasi positif dengan pendapatan petani.

2. Kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian berarti 2 (dua) hal yaitu mengurangi ketergantungan impor dan kemampuan menyediakan kebutuhan pangan mandiri. Melepaskan ketergantungan impor dalam berbagai sektor merupakan isu strategis yang dibahas dan diupayakan, termasuk sektor pertanian. Kondisi geopolitik global yang memanas menyebabkan terganggunya rantai pasok dan perdagangan global serta berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga pangan. Tantangan yang perlu dijawab untuk menurunkan risiko tersebut

adalah bagaimana Indonesia secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional agar kemandirian dapat terwujud.

3. Bahan baku bio energi

Isu terkait bahan baku bio energi adalah bagaimana sektor pertanian dapat berkontribusi dalam ketahanan energi melalui penyediaan sumber energi alternatif. Beberapa komoditas pertanian seperti komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura berkontribusi terhadap penyediaan bahan baku tersebut. Tersedianya bahan baku bio energi asal pertanian diharapkan dapat berkontribusi untuk membantu transisi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan di tingkat nasional.

4. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian

Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional. Indonesia tidak lagi diharapkan menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk pertanian. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pengolahan yang tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (*close to market*), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari petani menuju ke pengguna akhir (*end customer*) akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat. Peningkatan daya saing produk pertanian menitik beratkan pada persaingan terhadap produk pertanian sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk pertanian nasional dibanding produk pertanian negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang dipersyaratkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor.

5. Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Kesehatan sendiri adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Agar dapat mewujudkannya, maka harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan Kewaspadaan Wabah, penanggulangan Wabah, dan pasca Wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Poin tujuan antara di atas dapat terlaksana jika koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, untuk dapat mewujudkan tujuan antara tersebut, maka pilar penyokong harus berdiri tegak. Berikut penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut.

1. Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi

Pilar 1 (satu) berkontribusi terhadap Kemandirian pangan asal pertanian. Prasarana dan sarana pertanian meliputi lahan pertanian, air untuk pertanian, pupuk dan pestisida untuk pertanian, serta alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan pra panen dan pasca panen.

Peran Kementerian Pertanian dalam menyediakan, mendistribusikan serta menjamin kualitas prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi. Orientasi berbasis kebutuhan produksi berarti setiap proses penyediaan harus tepat dan akurat sesuai kebutuhan komoditas pertanian strategis nasional. Pendistribusian berarti ketepatan waktu dan ketepatan penyaluran prasarana dan sarana pertanian berdasarkan jenis komoditas dan sebaran wilayah tanam maupun panen nasional. Penjaminan kualitas yaitu memastikan bahwa prasarana dan sarana pertanian telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan

Pilar 2 (dua) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Modern dalam produksi dan produktivitas adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pertanian dalam menggunakan sumber daya sebagai input (baik hayati dan non hayati) yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam metode pertanian saat ini, sering disebut dengan pertanian presisi, yaitu metode pertanian yang menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut mustahil terwujud tanpa pemanfaatan teknologi pertanian termutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan yang terjadi adalah bagaimana Kementerian Pertanian dapat mengidentifikasi teknologi yang tepat sesuai karakteristik petani nasional, meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya teknologi pertanian tersebut, dan memastikan petani dapat beradaptasi dan mampu menggunakan teknologi tersebut.

3. Pilar 3: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional

Pilar 3 (tiga) berkontribusi terhadap nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hilirisasi komoditas meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian strategis melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien. Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk tidak lagi menjual bahan baku maupun produk setengah jadi, namun menjual produk yang siap konsumsi. Dengan menghasilkan produk yang siap konsumsi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani maupun usaha tani.

4. Pilar 4: Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung Pangan Nasional

Pilar 4 (empat) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Untuk mewujudkan kemandirian pangan maka kebutuhan masyarakat wajib terpenuhi melalui produksi dalam negeri. Orientasi produksi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun juga antisipasi kebutuhan pangan di masa mendatang. Pemerintah Indonesia meluncurkan program KSPP yaitu sentra produksi terintegrasi pangan untuk mendorong terciptanya lumbung pangan nasional. Ketersediaan lumbung pangan nasional diharapkan dapat menghindari masyarakat dari kerawanan pangan yang disebabkan baik faktor dalam negeri maupun faktor global.

5. Pilar 5: Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian

Pilar 5 (lima) berkontribusi terhadap Pertumbuhan volume usaha pertanian. Perlindungan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan usaha tani. Perlindungan dilakukan dengan memberikan asuransi tani yang dapat mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun gangguan OPT. Akses pembiayaan sendiri merupakan stimulus yang diberikan kepada petani untuk

pengembangan usaha pertanian. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menyediakan akses perlindungan dan pembiayaan serta mendorong pemanfaatan keduanya oleh petani atau usaha tani.

6. Pilar 6: Pengawasan Kepatuhan tata kelola Pertanian Berkelanjutan

Pilar 6 (enam) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Tata kelola pertanian berkelanjutan adalah bagaimana penyelenggaraan pertanian yang mensejahterakan petani (profit) dan memberikan dampak seluas-luasnya kepada masyarakat (people) tanpa merusak lingkungan (planet). Kementerian Pertanian mengambil peran untuk mengawasi kepatuhan terhadap standar tata kelola pertanian berkelanjutan nasional.

7. Pilar 7: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani

Pilar 7 (tujuh) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Pertumbuhan volume usaha tani dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu SDM pertanian dan produk pertanian. Profesi petani bukan pilihan mayoritas generasi muda sehingga di masa mendatang, ancaman kurangnya kuantitas petani berpotensi terjadi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak masif karena kebutuhan produk komoditas pertanian yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi global maupun nasional, membutuhkan lebih banyak modal, termasuk modal manusia. Faktor berikutnya yaitu kualitas usaha tani yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan petani. Penyuluh pertanian memainkan peran strategis untuk meningkatkan keduanya dengan memberikan informasi, edukasi dan mendorong meningkatnya peningkatan serta adopsi teknologi dan metode pertanian mutakhir.

8. Pilar 8: Sistem Kesehatan hewan nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular.

Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner.

Delapan pilar di atas dapat berdiri tegak jika didukung oleh fondasi yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, terdapat 5 (lima) fondasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian

Ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku pertanian, berkelanjutan merupakan aset berharga yang perlu dimiliki. Kelembagaan pertanian dapat berkembang jika SDM pertanian tersedia dan kompeten. Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM Pertanian serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan pertanian.

2. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian

Implementasi RB Kementerian Pertanian adalah untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas yang dapat mendorong tercapainya pembangunan sektor pertanian. Implementasi RB nasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB Generik dan RB Tematik. Kementerian Pertanian tidak hanya berkontribusi melaksanakan RB Generik namun juga RB Tematik untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit dari pembangunan sektor pertanian.

3. Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian

Standarisasi produk dan praktik pertanian merupakan penyeragaman spesifikasi berdasarkan standar baku yang telah ditetapkan melalui regulasi. Standar baku tersebut memuat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi produk pertanian serta panduan untuk melaksanakan setiap tahapan dalam praktik pertanian nasional. Penyeragaman dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas produk pertanian maupun menjaga konsistensi implementasi praktik pertanian. Sertifikasi merepresentasikan jaminan tertulis terkait produk maupun praktik pertanian yang menyatakan keduanya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menjamin ketersediaan standar produk dan standar praktik pertanian berkelanjutan serta melakukan sertifikasi terhadap produk dan praktik pertanian berkelanjutan.

4. Pemanfaatan teknologi pertanian modern

Perkembangan penyelenggaraan pertanian global yang telah memasuki era agrikultur 4.0 didorong oleh perkembangan teknologi. Peran kecerdasan buatan, berbagai sensor yang dapat membantu pengambilan keputusan. Teknologi pertanian tersebut perlu didorong pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pertanian

berkelanjutan nasional. Kementerian Pertanian tidak hanya mengambil peran dalam penyediaan teknologi pertanian dalam bentuk prasarana dan sarana pertanian, namun juga mendorong penggunaan teknologi tersebut oleh para petani.

5. Tata kelola pertanian berkelanjutan (*Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices, dll*)

Tata kelola pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan pertanian modern yang berupaya menjamin akses generasi mendatang terhadap komoditas pertanian serta peningkatan kualitas, mutu dan keamanan komoditas pertanian. Dengan persaingan global yang semakin ketat, ketiganya merupakan trilogi yang harus dimiliki secara bersamaan untuk menciptakan daya saing produk pertanian. Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menciptakan instrumen, memberikan edukasi kepada petani maupun kelompok tani mengenai sistem pertanian berkelanjutan, hingga mendorong implementasi pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi **“Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia”** di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 1:** Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.

- **Strategi 2:** Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi.
- **Strategi 3:** Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
- **Strategi 4:** Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif

2. Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 5:** Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan
- **Strategi 6:** Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan
- **Strategi 7:** Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
- **Strategi 8:** Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
- **Strategi 9:** Pemanfaatan teknologi pertanian modern.

3. Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 10** “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”

4. **Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 11** “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
5. **Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 12** “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”
6. **Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.”** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 13** “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance*”.

2.2 Arah kebijakan dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Arah kebijakan dan kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan upaya strategis (*strategic direction*) yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan Ditjen PKH guna mencapai Visi dan Misi Ditjen PKH tahun 2025/2029. Arah kebijakan dan kegiatan Ditjen PKH disusun berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH yang selaras dengan rumah strategi Kementerian Pertanian, seperti diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar 36 Kerangka Strategis Ditjen PKH tahun 20252029

Berdasarkan kerangka strategis Ditjen PKH tahun 20252029 diatas, dapat dilihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai Ditjen PKH adalah "**Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan dan bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**". Tujuan akhir tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) tujuan antara, yaitu:

- Pertumbuhan volume usaha peternakan
- Kemandirian pangan asal peternakan berkelanjutan
- Nilai tambah dan daya saing produk peternakan
- Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan

Penjelasan masing masing tujuan antara secara garis besar telah dijelaskan pada rumah strategi Kementerian Pertanian tahun 20252029 sebelumnya, dimana peternakan merupakan salah satu komoditas atau sub sub sektor pada sub sektor pertanian. Untuk mewujudkan tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pilar strategis 1: Ketersediaan akses pasar peternakan

Pilar ini merupakan upaya dalam menyediakan dan/atau memperluas akses pasar peternakan, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan penjualan produk peternakan nasional. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pilar strategis 1 ini adalah:

- **Arah kebijakan 1: Pengolahan dan Pemasaran produk peternakan bernilai tambah dan berdaya saing.**

- Kegiatan 1.1: Pengembangan dan perluasan akses pasar domestik bagi pelaku usaha peternakan.
- Kegiatan 1.2: Perluasan pasar ekspor peternakan dalam memperluas *market share* produk peternakan Indonesia.

2. Pilar strategis 2: Budidaya ternak modern, produktif dan berkelanjutan dalam menghasilkan pangan bermutu dan aman.

Pilar ini merupakan upaya dalam pelaksanaan budidaya ternak berkelanjutan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penerapan *Good Farming Practices*, *Good Breeding Practices* maupun regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan terkait ternak akan dilaksanakan pada pilar strategis 2 ini. Arah kebijakan dan kegiatan pada pilar strategis 2 ini adalah:

- **Arah kebijakan 2: Produksi ternak produktif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak nasional**

- Kegiatan 2.1: Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) ternak
- Kegiatan 2.2 : Pembibitan dan produksi ternak berkelanjutan berdasarkan prioritas
- Kegiatan 2.3 : Memastikan ketersediaan pakan yang terjangkau dalam memenuhi kebutuhan pakan populasi ternak
- Kegiatan 2.4 : Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada ternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak, termasuk mengurangi susut pangan asal ternak.
- Kegiatan 2.5 : Penjaminan mutu dan keamanan produk peternakan

3. Pilar strategis 3: Hilirisasi produk hasil peternakan

Pilar ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan melalui hilirisasi produk hasil peternakan terintegrasi. Pemerintah akan mendorong pelaku usaha peternakan dalam melakukan hilirisasi produk peternakan yang dijual, sehingga akan meningkatkan harga jual dan berdampak terhadap pertumbuhan usaha peternakan. Hal ini tentunya akan memberikan efek remah roti bagi peternak lainnya, khususnya peternak rakyat. Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan adalah:

- **Arah Kebijakan 1: Pengolahan dan Pemasaran produk peternakan bernilai tambah dan berdaya saing.**
 - Kegiatan 1.3 : Pengolahan produk peternakan berbasis hilirisasi.
 - Kegiatan 1.4 : Meningkatkan kualitas produk ekspor peternakan dalam memenuhi permintaan ekspor pangan asal peternakan

4. Pilar strategis 4: Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular.

Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini

Kementerian/Lembaga. Pengendalian penyakit hewan dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner.

Arah kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pada pilar strategis 4 ini adalah:

- **Arah Kebijakan 3: Penegakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional**
 - Kegiatan 3.1: Kesiapsiagaan dari penularan penyakit hewan
 - Kegiatan 3.2: Ketahanan dari penularan penyakit hewan
 - Kegiatan 3.3: Peningkatan kesadaran masyarakat dari penyakit hewan

5. Pondasi strategis: SDM, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Ditjen PKH

Pondasi strategi merupakan dasar yang menopang berdirinya seluruh pilar strategis. Dalam konteks strategi, pondasi strategis merupakan *strategic assets* atau aset strategis yang harus dimiliki organisasi. Pilar strategis dalam kerangka strategi Ditjen PKH ini terdiri atas Sumber Daya Manusia, organisasi dan kelembagaan Ditjen PKH maupun tata kelola birokrasi Ditjen PKH.

Arah Kebijakan dan Kegiatan yang dilakukan pada Pondasi Strategis ini adalah:

- **Arah Kebijakan 4: Birokrasi Ditjen PKH yang transparan dan akuntabel**
 - Kegiatan 4.1: Mengembangkan modal manusia (*human capital*) SDM Ditjen PKH yang produktif.
 - Kegiatan 4.2: Mengembangkan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang tepat fungsi dan ukuran.
 - Kegiatan 4.3: Mendukung pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Ditjen PKH
 - Kegiatan 4.4: Memberikan layanan internal yang berkualitas dan berbasis digital.

2.3 Kerangka Regulasi

Sub bab kerangka regulasi ini menjelaskan mengenai gambaran umum Regulasi yang dibutuhkan oleh Ditjen PKH dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta

kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Program Ditjen PKH dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pertanian. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Ditjen PKH dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Kerangka regulasi Ditjen PKH

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPERMENTAN: Izin Pengadaan Benih Unggul melalui Pemasukan dari Luar Negeri dan Izin Pengeluaran Benih Unggul dari Wilayah Negara Republik Indonesia (<i>Updating</i>)	Pendelegasian UU no 22 Tahun 2019	Ditjen TP, Horti, PKH		2027
2	Revisi UU Peternakan		Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan		
3	RPerpres: Sistim Kesehatan Hewan Nasional				
4					
5					

2.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen PKH dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan,

kontribusi dan peran Ditjen PKH dalam mencapai visi Kementerian Pertanian serta agenda pembangunan jangka panjang pada RPJPN, prioritas pembangunan pada RPJMN, dan Visi Misi Presiden. Penyusunan kerangka kelembagaan Ditjen PKH juga mengacu kepada kebijakan pembangunan, peraturan perundangan undangan dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.

Kerangka kelembagaan Ditjen PKH disusun melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan Ditjen PKH. Kegiatan FGD dilakukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait SOTK saat ini dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi pada periode Renstra 2025-2029. Permasalahan-permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menyusun desain kriteria (*criteria design*) organisasi yang baru. Berikut adalah permasalahan terkait SOTK saat ini:

1. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum menyatakan secara eksplisit unit kerja khusus yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan, sehingga saat ini tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan dilakukan secara parsial di masing-masing unit eselon I teknis
2. Pelaksanaan sertifikasi standar (*mandatory*) mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh unit teknis (Dit. PPH di 4 Ditjen), sedangkan tugas dan fungsi standarisasi terdapat di BSIP □ Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi di Dit PPH Ditjen TP, Dit. PPH Hortikultura, dan Dit. PPH Perkebunan
3. Belum ada unit kerja khusus yang menangani penerapan teknologi *digital farming* menuju pertanian maju dan modern

4. Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak □ belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1.

Lebih jelasnya terkait permasalahan terkait SOTK saat ini dan desain kriteria organisasi yang baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Permasalahan terkait SOTK dan Desain kriteria Ditjen PKH

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Belum ada unit kerja khusus dalam melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon I di bawah Menteri yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan
2	Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi di Dit PPH Ditjen TP, Dit. PPH Hortikultura, dan Dit. PPH Perkebunan	Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi)
3	Belum ada unit kerja khusus yang menangani adopsi teknologi <i>digital farming</i> menuju pertanian maju dan modern	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon 1 yang menangani adopsi teknologi digital farming menuju pertanian maju dan modern
4	Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak □ belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1	Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I sebagai Otoritas Veteriner Nasional

Desain kriteria organisasi Ditjen PKH dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH tahun 2025-2029 adalah:

- UKE I yang menangani budidaya pertanian secara modern dan berkelanjutan dalam menghasilkan produksi komoditas pertanian, memiliki desain unit kerja setingkat eselon II berdasarkan proses bisnis utama pertanian, yaitu:
 - Perbenihan/pembibitan berkelanjutan,
 - Penanaman/Populasi berkelanjutan,
 - Penerapan praktik budidaya pertanian modern dan berkelanjutan,
 - Perlindungan tanaman dan ternak berkelanjutan,
 - Panen dan pasca panen, dan

- Penjaminan mutu dan keamanan komoditas pertanian.
- UKE I yang menangani hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional, memiliki desain unit kerja setingkat eselon II berdasarkan fungsi, yaitu:
 - Pemasaran ekspor dan domestik,
 - Hilirisasi dan ekosistem industri pertanian,
 - Pengolahan komoditas pertanian,
 - Produksi komoditas pangan dan non pangan untuk ekspor, dan
 - Penjaminan mutu komoditas ekspor pertanian.
- UKE I yang menangani kepatuhan tata Kelola pertanian berkelanjutan sesuai amanat UU 22/2019, memiliki desain unit kerja setingkat eselon II berdasarkan kelompok komoditas, yaitu:
 - Tata Kelola dan adopsi teknologi pertanian tanaman pangan,
 - Tata Kelola dan adopsi teknologi pertanian tanaman Hortikultura
 - Tata Kelola dan adopsi teknologi pertanian tanaman Perkebunan, dan
 - Tata Kelola dan adopsi teknologi peternakan
- Unit kerja setingkat eselon I yang memiliki kewenangan sebagai otoritas veteriner nasional, memiliki desain unit kerja setingkat eselon II berdasarkan fungsi, yaitu:
 - Pencegahan zoonosis,
 - Pemberantasan penyakit hewan,
 - Tata Kelola sistem Kesehatan hewan nasional, dan
 - Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah UKE I yang menangani budidaya pertanian secara modern dan berkelanjutan dalam menghasilkan produksi komoditas pertanian, memiliki desain struktur berdasarkan proses, yaitu:
 - Perbenihan/pembibitan
 - Pengujian mutu benih/bibit
 - Pengujian mutu pakan ternak

- Pengujian mutu obat hewan
- Peramalan OPT dan DPI
- Perlindungan tanaman
- Veteriner
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah UKE I yang menangani tata Kelola pertanian berkelanjutan sesuai amanat UU 22/2019, memiliki desain struktur berdasarkan kelompok komoditas dan produk, yaitu:
 - Adopsi teknologi pertanian (TP, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)
 - Mekanisasi pertanian berkelanjutan
 - Sumber Daya Lahan Pertanian
 - Pasca Panen komoditas Pertanian
 - Budidaya komoditas pertanian (TP, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)
 - Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik

Desain kriteria organisasi Ditjen PKH disusun berdasarkan kebutuhan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Desain kriteria organisasi Ditjen PKH bukan merupakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Pertanian. Untuk menghasilkan struktur organisasi Kementerian Pertanian yang ideal diperlukan analisis lebih lanjut di luar dokumen Renstra Kementerian Pertanian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target kinerja

Target kinerja adalah pencapaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target ini mencerminkan ukuran atas keberhasilan yang ingin dicapai organisasi, yang meliputi: Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Dengan menetapkan target kinerja yang jelas, organisasi dapat memantau perkembangan, mengukur keberhasilan, dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan/program yang dilaksanakan selaras dengan rencana strategis yang telah disusun.

Target kinerja Ditjen PKH disusun melalui serangkaian FGD dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk menyepakati Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) beserta indikator kinerja (IKP dan IKK) beserta target. Penentuan SP, SK, IKP, dan IKK Ditjen PKH dilakukan dengan mengacu pada Sasaran Strategis Kementan, dan mempertimbangkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta RPJMN dan RPJPN. Berikut adalah SP, SK, IKP, dan IKK Ditjen PKH yang telah disepakati:

Tabel 7. Target Kinerja Ditjen PKH 2025-2029

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima Peternak	IKP 1.1	Indeks harga yang diterima Peternak	124,75	126,62	128,52	130,45	132,41
SP 2	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari	IKP 2.1	Persentase produksi peternakan terhadap	77,42	78,32	79,18	80,19	81,33

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	produksi dalam negeri		kebutuhan pangan prioritas asal peternakan dalam negeri					
SP 3	Terjaminnya mutu komoditas peternakan	IKP 3.1	Indeks Mutu komoditas peternakan	0,54	0,56	0,58	0,61	0,63
SP 4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	IKP 4.1	Indeks keamanan komoditas peternakan	0,61	0,63	0,66	0,68	0,69
SP 5	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan	IKP 5.1	Ratarata volume ekspor komoditas peternakan (ton)	141.759,3 7	148.641,3 7	155.858,7 1	163.425,8 4	171.360,3 7
SP 6	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 6.1	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan	0,2	0,4	0,6	0,8	1
SP 7	Terkendalnya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	IKP 7.1	Persentase jumlah wilayah atau kawasan yang berstatus bebas atau terkendali dari penyakit hewan terhadap wilayah atau kawasan keseluruhan	80	80,3	80,6	80,9	81,2
SP 8	Terkendalnya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan	IKSP 7.1	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan	41	41,5	42	42,5	43

No	Sasaran Program (SP)	Kode IKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	yang mempengaruhi kesehatan manusia		penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia					

Tabel 8. Target Kinerja Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak 2025-2029

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK.1	Meningkatnya potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas	IKK 1.1	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas
SK.2	Tersedianya bibit dan benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi peternakan	IKK 2.1	Persentase ketersediaan bibit dan benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi peternakan menuju swasembada
		IKK 2.2	Persentase rumpun genetik ternak tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya
SK.3	Terlindungnya sumber daya genetik hewan	IKK 3.1	Persentase ketersediaan SDG hewan tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya
SK.4	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak	IKK 4.1	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Siborongborong
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BIB Lembang
			Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBIB Singosari
			Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BET Cipelang
			Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BET Cipelang
SK.5	Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar dalam memenuhi bibit/benih ternak	IKK 5.1	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTU HPT Indrapuri
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTU HPT Siborongborong
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTUHPT Padang Mangatas
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTU HPT Sembawa
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BBPTUHPT Baturraden
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTU HPT Denpasar
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BPTU HPT Pelaihari
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BIB Lembang
			Persentase ketersediaan bibit/benih ternak unggul bermutu terhadap total ternak/benih yang beredar di wilayah kerja BBIB Singosari

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			Persentase ketersediaan benih ternak unggul bermutu terhadap total benih yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang
			Persentase ketersediaan bibit ternak unggul bermutu terhadap total ternak yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang

Tabel 9. Target Kinerja Direktorat Pakan 20252029

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK.1	Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman berdasarkan kebutuhan populasi ternak	IKK 1.1	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak
		IKK 1.2	Persentase pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak yang diproduksi untuk diedarkan
SK.2	Terpenuhinya bahan pakan sumber energi dalam negeri berdasarkan kebutuhan bahan pakan	IKK 2.1	Persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap total bahan pakan yang dibutuhkan
SK 3	Terpenuhinya mutu dan Keamanan Pakan Ternak	IKK 3.1	Persentase pengujian mutu dan keamanan pakan ternak yang dapat diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSP Bekasi permintaan pengujian
SK 4	Tersedianya hijauan pakan ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak	IKK 4.1	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak
			Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Indrapuri
			Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Padang Mangatas
			Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT SiborongBorong
			Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Sembawa
			Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTU HPT Baturraden

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Denpasar
			Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Pelaihari
SK 5	Tersedianya pakan ternak yang bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan	IKK 5.1	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Indrapuri
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Padang Mangatas
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Siborongborong
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Sembawa
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBPTU HPT Baturraden
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Denpasar
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Pelaihari
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BIB Lembang
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBIB Singosari
			Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BET Cipelang

Tabel 10. Target Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan 20252029

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK.1	Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS	IKK 1.1	Tingkat kepatuhan peternakan terhadap standar biosekuriti)
SK.2		IKK 2.1	Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap wabah penyakit Hewan	IKK 2.2	Persentase Jumlah Kab/Kota yang dapat menekan kasus Rabies
SK.3	Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar	IKK 3.1	Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar
SK.4	Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan	IKK 4.1	Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan
SK.5	Terlaksananya pengujian PHMS pada hewan (Balai Besar)	IKK 5.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Maros
			Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVET Wates
SK 6	Terlaksananya pengujian PHMS pada hewan (Balai)	IKK 6.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Medan
			Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bukit Tinggi
			Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bandar Lampung
			Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Subang
			Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Banjarbaru
			Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Papua

Tabel 11. Target Kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 20252029

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK.1	Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	IKK 1.1	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total komoditas produk peternakan siap edar
SK.2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewan	IKK 2.1	Indeks keamanan dan kesehatan produk hewan

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
		IKK 2.2	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan
		IKK 2.3	Tingkat kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan nasional
SK 3	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan	IKK 5.1	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian

Tabel 12. Target Kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan 20252029

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha tani	IKK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan
SK.2	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu	IKK 2.1	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan
		IKK 2.2	Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian
SK.3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor	IKK 3.1	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan
SK 4	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing	IKK 4.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan
SK 5	Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan	IKK 5.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 12. Target Kinerja Sekretariat PKH 20252029

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK.1	Ditindaklanjuti hasil temuan pengawas intern	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH
SK.2	Ditindaklanjuti hasil temuan BPK	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH
SK.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementan	IKK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH

Kode SK	Sasaran Kegiatan (SK)	Kode IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
SK 4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen di lingkungan Kementerian Pertanian	IKK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH
SK 5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen PKH	IKK 5.1	Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDitjen PKH
SK 6	Terlaksananya Renaksi RB oleh Ditjen PKH	IKK 6.1	Persentase pelaksanaan renaksi RB terhadap total rencana aksi RB sesuai kewenangan Ditjen PKH

3.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu komponen krusial dalam Renstra Ditjen PKH tahun 2025-2029. Kerangka ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan ini mencakup sumber pendanaan, alokasi anggaran, dan mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesesuaian dengan prioritas nasional. Melalui kerangka pendanaan yang komprehensif, Ditjen PKH berkomitmen untuk mencapai visi dan misinya dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia selama periode 2025-2029. Target kinerja dan kerangka pendanaan Ditjen PKH dapat dilihat pada tabel target kinerja dan kerangka pendanaan ditjen PKH 2025-2029 di bawah ini:

Tabel 13. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ditjen PKH 20252029

DRAFT

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN PERTANIAN													
SS. 1	Meningkatnya pendapatan petani												
IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)		127,91	130,30	136,72	143,30	148,90						
SS. 2	Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan												
IKSS 2.1	Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas		66,00	68,00	68,00	70,00	72,00						
SS. 4	Meningkatnya pangsa pasar (<i>market share</i>) produk ekspor pertanian												
IKSS 4.1	<i>Market share</i> produk ekspor pertanian (%)		2,65	2,70	2,75	2,80	2,85						
SS. 5	Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan												
IKSS 5.1	Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan		0,2	0,4	0,6	0,8	1						
SS. 6	Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia												
IKSS 6.1	<i>Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia</i>		2,7	2,7	2,7	2,7	1,7						
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI													
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN													
Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1: Bertumbuhnya usaha tani nasional / Meningkatkan indeks harga yang diterima petani													
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima Peternak												Ditjen PKH
IKSP 1.1	Indeks harga yang diterima Peternak		124.75	126.62	128.52	130.45	132.41	667.488	720.000	864.000	1,036.800	1,244.160	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Immediate Outcome (<i>Imm.O</i>) 1.1.1.3: Tersedianya akses pasar yang dapat dimanfaatkan usaha tani													
KEGIATAN													
SK.1	Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha tani												Dit PPH PKH
IKSK 1.1	Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan		100	100	100	100	100	667.488	720.000	864.000	1,036.800	1,244.160	
	O.1 Kerja sama pemasaran dalam negeri untuk komoditas Peternakan												
	O.2 Pembinaan pemasaran usaha Peternakan												
Intermediate Outcome2.1.1: Terpenuhiya kebutuhan pangan asal pertanian dari produksi dalam negeri													
SP.2	Terpenuhiya kebutuhan pangan asal peternakan dari produksi dalam negeri												Ditjen PKH
IKSP 2.1	% produksi peternakan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal peternakan dalam negeri		77,42	78,32	79,18	80,19	81,33	3,387,497	3,700,197	3,739,494	3,778,026	3,834,558	
Intermediate Outcome 2.1.1.1: Terpenuhiya produktivitas komoditas pertanian prioritas menuju swasembada													
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK													
SK.1	Terpenuhiya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman berdasarkan kebutuhan populasi ternak												Dit Pakan PKH
IKSK 1.1	Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak		97.76	97.77	97.79	97.80	97.81	1,048	71,360	84,220	95,870	109,155	
	O.1 Pakan ternak berdasarkan kebutuhan populasi ternak menuju swasembada												
IKSK 1.2	Persentase pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan		100%	100%	100%	100%	100%		4,400	5,125	5,775	6,325	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	terhadap total pakan ternak yang diproduksi untuk diedarkan												
	O.2 Penjaminan mutu dan keamanan pakan												
SK.2	Terpenuhinya bahan pakan sumber energi dalam negeri berdasarkan kebutuhan bahan pakan												Dit Pakan PKH
IKSK 2.1	Persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap total bahan pakan yang dibutuhkan		73	75	76	78	79		2,132	2,310	2,569	2,783	
	O.3 Pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri yang bermutu dan aman menuju swasembada												
SK.1	Terpenuhinya mutu dan keamanan pakan ternak												BPMSP
IKSK 1.1	Persentase pengujian mutu dan keamanan pakan ternak terhadap total permintaan pengujian		100%	100%	100%	100%	100%	6.100	7.500,	9.000,	10.500	12.000	
	O.1 Pengujian mutu pakan ternak menuju swasembada												
SK.1	Tersedianya benih/bibit hijauan pakan ternak bermutu dalam memenuhi permintaan dari peternak												BBPTUHPT
IKSK 1.1	Persentase permintaan benih/bibit hijauan pakan ternak bermutu yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak							27.552	42.220	47.220	52.220	57.220	
	O.1 Hijauan pakan ternak berdasarkan permintaan peternak												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Indrapuri		75	80	85	90	95						
	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Padang Mangatas		75	80	85	90	95						
	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT SiborongBorong		75	80	85	90	95						
	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Sembawa		75	80	85	90	95						
	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTU HPT Baturaden		75	80	85	90	95						
	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Denpasar		75	80	85	90	95						
	Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTU HPT Pelaihari		75	80	85	90	95						
SK.2	Tersedianya pakan ternak yang bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan												BBPTUHPT / BBIB / BIB / BET
IKSK 2.1	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak							71,394	90,000	95,000	100,000	105,000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	O.1 Pakan ternak bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan												
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Indrapuri		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Padang Mangatas		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Siborongborong		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Sembawa		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBPTU HPT Baturraden		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Denpasar		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Pelaihari		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BIB Lembang		100	100	100	100	100						
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBIB Singosari												
	Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BET Cipelang		100	100	100	100	100						
Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.2 “Terpenuhinya Luas Tanam, Luas Panen dan potensi produksi ternak komoditas pertanian prioritas”													
SK.1	Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas												Dit BitPro
IKSK. 1.1	Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas peternakan prioritas menuju swasembada		79.53	80.55	81.51	82.65	83.94	2.311.494	231.660	303.464	321.991	342.871	
	O.1 Pengelolaan potensi produksi ternak prioritas menuju swasembada												
	O.2 Populasi ternak prioritas menuju swasembada												
Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.3 “Terlindunginya komoditas pertanian menuju swasembada dari OPT, PHMS dan dampak perubahan iklim”													
SK.1	Meningkatnya perlindungan hewan ternak dari PHMS												Dit Kesehatan Hewan
IKSK 1.1	Tingkat kepatuhan peternakan terhadap standar biosekuriti		0,6	0,63	0,66	0,69	0,72	138.050	2.580.007	2.584.262	2.588.177	2.595.782	
	O.1 Pencegahan penularan PHMS pada ternak												
	O.2 Pemberantasan penyakit hewan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar												BBPMSOH
IKSK 1.1	Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar		90	91	92	93	94	8.385	8.385	8.385	8.385	8.385	
	O 1. Pengujian mutu dan keamanan obat hewan yang beredar												
SK.1	Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan												BBVet Farma Pusvetma
IKSK 1.1	Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan		100%	100%	100%	100%	100%	15.463	8.465	11.220	13.635	18.240	
	O 1. Penyediaan obat hewan sesuai kebutuhan												
SK.1	Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner												
IKSK 1.1	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Maros	BBVet Maros	98	98	98	98	98						
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Denpasar	BBVet Denpasar	98	98	98	98	98						
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVET Wates	BBVet Wates	98	98	98	98	98						
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Medan	BVet Medan	98	98	98	98	98						
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian		98	98	98	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PHMS di Balai Veteriner Bukit Tinggi												
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bandar Lampung		98	98	98	98	98						
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Subang		98	98	98	98	98						
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Banjarbaru		98	98	98	98	98						
	Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Jayapura		98	98	98	98	98						
	O.1 Identifikasi PHMS pada ternak												
	O.1 Pengujian PHMS pada ternak												
Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.1.4 "Tersedianya pupuk, benih/bibit dan pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian"													
SK. 2	Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi peternakan												Dit Bitpro
IKSK 2.1	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi peternakan	Pusat	67.81	68.33	68.92	69.56	70.21	-	1.950	1.950	1.950	1.950	
	O.3 Menjamin ketersediaan dan akses peternak terhadap bibit ternak bermutu												
SK 3	Terlindunginya Sumber Daya Genetik (SDG) hewan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase ketersediaan SDG hewan tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya	Pusat	95.5	96	97	98	99		600	600	600	600	
	O.5 Pelestarian SDG ternak untuk komoditas pertanian												
SK 4	Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak							160.710	68.536	654.000	65.000	82.191	BB/BPTUH PT (bibit), BBIB (benih), BIB (benih), BET (bibit/beni h)
IKSK 4.1	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri		77	80	82	84	85						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Siborongborong		70	75	78	82	85						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas		60	65	70	75	80						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa		95	96	97	98	98						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden		64	66	68	70	72						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar		90	91	92	93	95						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari		70	73	75	78	80						
	Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BET Cipelang		55	51	53	54	60						
	O.1 Produksi bibit ternak unggul bermutu												BB/BPTUH PT / BET
	<i>Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BIB Lembang</i>		95	96	97	98	98						
	<i>Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBIB Singosari</i>		95	96	97	98	98						
	O.1 Produksi semen beku bermutu												BBIB, BIB
	<i>Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BET Cipelang</i>		70	71	73	74	95						
	O.1 Produksi Embrio ternak bermutu												BET
SK.1	Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar dalam memenuhi bibit/benih ternak							176.804	179.071	202.438	212.142	221.943	BB/BPTUH PT (bibit), BBIB (benih), BIB (benih), BET (bibit/beni h)
IKSK 1.1	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri		77	80	82	84	85						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Siborongborong		81,48	84,25	85,74	86,98	87,74						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas		85	86	87	88	90						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa		95	96	97	98	98						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden		80	82	83	84	85						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar		90	91	92	93	95						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari		70	73	75	78	80						
	O.1 Pengujian performa bibit ternak												BBIB/ BIB/BET
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BIB Lembang		95	96	97	98	98						
	Persentase permintaan bibit/benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBIB Singosari		95	96	97	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BET Cipelang		90	92	93	94	95						BB/BPTUH PT
	O.1 Pengujian Mutu benih ternak												
	O.2 Pengawasan Mutu benih/bibit ternak												BB/BPTUH PT, BBIB/BIB/B ET
Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.3: Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian													
SP 3	Terjaminnya mutu komoditas peternakan												Ditjen PKH
IKSP 3.1	Indeks Mutu komoditas peternakan		0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	396.120	780	936	1,123	1,347	
SP 4	Terjaminnya keamanan komoditas peternakan												
IKSP 4.1	Indeks Keamanan komoditas peternakan		0.613	0.634	0.656	0.678	0.695	29.230	102.154	106.452	110.099	114.396	
Intermediate Outcome (Int.O) 2.1.3.1 "Terwujudnya komoditas pertanian bermutu dan aman"													
SK.2	Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu												Dit PPH PKH
IKSK 2.1	Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan		80	85	90	95	100	300	680	816	979	1,175	
	O.3 Pengawasan Mutu komoditas hasil peternakan												
SK.1	Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku												Dit Kesmavet

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK.1.1	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total komoditas produk peternakan siap edar		90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	12.600	15.120	18.144	21.772	26.127	
	O.1 Pengawasan Keamanan komoditas hasil peternakan												
SK 2	Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan							15.527	28.061	30.943	33.925	37.271	
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSPH		98	98	98	98	98						
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates		98	98	98	98	98						
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Maros		98	98	98	98	98						
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Medan		98	98	98	98	98						
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bukittinggi		98	98	98	98	98						
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bandar		98	98	98	98	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Lampung												
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Subang		98	98	98	98	98						
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Banjarbaru		98	98	98	98	98						
	persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Jayapura		98	98	98	98	98						
	O.2 Pengujian keamanan produk hasil peternakan												
SK.1	Terwujudnya produk peternakan bermutu												BPMSPH
IKSK 1.1	Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian		98	98	98	98	98	96,120	100,000	120,000	144,000	172,800	
	O.1 Pengawasan Mutu komoditas hasil peternakan												
SK.2	Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku												BPMSPH
IKSK 2.1	Persentase pengujian keamanan produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian		90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	12.600	15.120	18.144	21.772	26.127	
	O.2 Pengawasan Keamanan komoditas hasil peternakan												
Intermediate Outcome (Int.O) 3.1.1: Meningkatnya volume ekspor komoditas pertanian yang siap digunakan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP 4	Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan yang siap digunakan												Ditjen PKH
IKSP 4.1	volume ekspor komoditas peternakan (ton)		141,759	148,641	155,858	163,425	171,360	200,000	250,000	300,000	360,000	432,000	
Intermediate Outcome (Int.O) 3.1.1.1 “Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian siap ekspor”													
KEGIATAN ...													
SK. 3	Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor												Dit PPH PKH
IKSK 3.1	Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan		100	100	100	100	100	667,488	720,000	864,000	1,036,800	1,244,160	
	O.4 Pembinaan nilai tambah dan daya saing potensi ekspor produk komoditas peternakan												
	O.5 Potensi produk ekspor produk komoditas peternakan												
	O.6 Promosi produk komoditas hasil peternakan prioritas												
Intermediate Outcome (Int.O) 3.2.1: Meningkatkan hasil pengolahan komoditas pertanian unggulan yang telah menerapkan hilirisasi													
SP. 5	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi												Ditjen PKH
IKSP 5.1	Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan		0,2	0,4	0,6	0,8	1	3,236	18,510	22,212	26,654	31,985	
Intermediate Outcome (Int.O) 3.2.1.1 “Meningkatnya komoditas pertanian unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing ”													
SK. 4	Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing												Dit PPH PKH

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK 4.1	Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan		20%	40%	60%	80%	100%	1,148	17,310	20,772	24,926	29,911	
	O.7 Pengelolaan rantai nilai komoditas peternakan												
	O.8 Pembinaan hilirisasi komoditas peternakan unggulan												
SK 5	Meningkatnya investasi bidang usaha peternakan terintegrasi pengolahan dan/atau pemasaran												Dit PPH PKH
IKSK 5.1	Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		16.26	16.76	17.26	17.76	18.26	2,087	1,200	1,440	1,728	2,073	
	O.9 Pendampingan investasi bidang usaha peternakan terintegrasi pengolahan dan/atau pemasaran												
Intermediate Outcome (Int.O) 5.1.1: Terkendalnya wilayah dan kawasan penyakit hewan serta penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan pada manusia													
SP 6	Terkendalnya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan												Ditjen PKH
IKSP 6.1	Persentase jumlah wilayah atau kawasan yang berstatus bebas atau terkendali dari penyakit hewan terhadap wilayah dan kawasan keseluruhan		80	80.3	80.6	80.9	81.2	1.625	1.427.295	1.433.270	1.401.345	1.401.720	
Intermediate Outcome (Int.O) 5.1.1.1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan, keamanan dan kesehatan produk hewan													
SK. 2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap wabah penyakit Hewan												Dit. Keswan
IKSK 2.1	Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan		0.60	0.64	0.67	0.71	0.74	1.208	6.772	6.772	6.772	6.772	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	O.1 deteksi potensi wabah penyakit hewan												
IKSK 2.2	Persentase Jumlah Kab/Kota yang dapat menekan kasus Rabies pada Hewan		53	56	59	62	65	417	1.420.523	1.426.498	1.394.573	1.394.948	
	O.2 Pemberantasan penyakit hewan												
Intermediate Outcome (Int.O) 5.1.1.1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap wabah penyakit hewan, keamanan dan kesehatan produk hewan													
SP 7	Terkendalnya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia												
IKSP 7.1	Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia		41	41.5	42	42.5	43	60.944	65.433	69.916	74.322	78.341	
KEGIATAN													
SK. 2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewan												Dit. Kesmavet
IKSK 2.1	Indeks keamanan dan kesehatan produk hewan		54.1	56.2	58.2	60.7	63.2	40.844	43.372	45.444	47.135	48.077	
	O.3 Pengawasan Keamanan Produk Hewan												
IKSK 2.2	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan		70	75	80	85	90	7.400	8.050	8.900	9.750	10.600	Dit. Kesmavet
	O.4 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk												
IKSK 2.3	Tingkat kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan nasional		60	62	65	67	70	12.700	14.010	15.572	17.436	19.663	Dit. Kesmavet

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	O.6 Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan												

BAB V

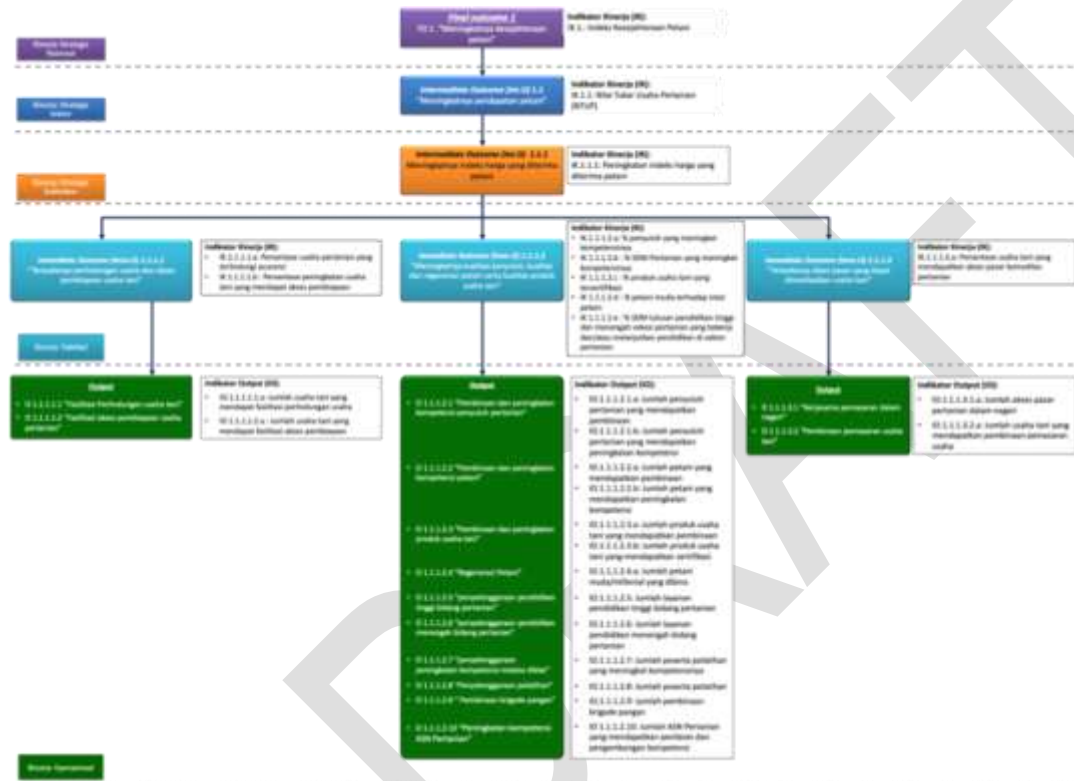
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Ditjen PKH) tahun 20252029 disusun sebagai panduan strategis dalam mewujudkan visi “Pernakan dan Kesehatan Hewan Maju, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”. Renstra ini telah dirancang dengan mengacu pada kerangka pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20252029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025, Renstra Kementerian Pertanian, serta Asta Cita sebagai landasan kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang di sektor peternakan dan kesehatan hewan, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kontribusi Ditjen PKH terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

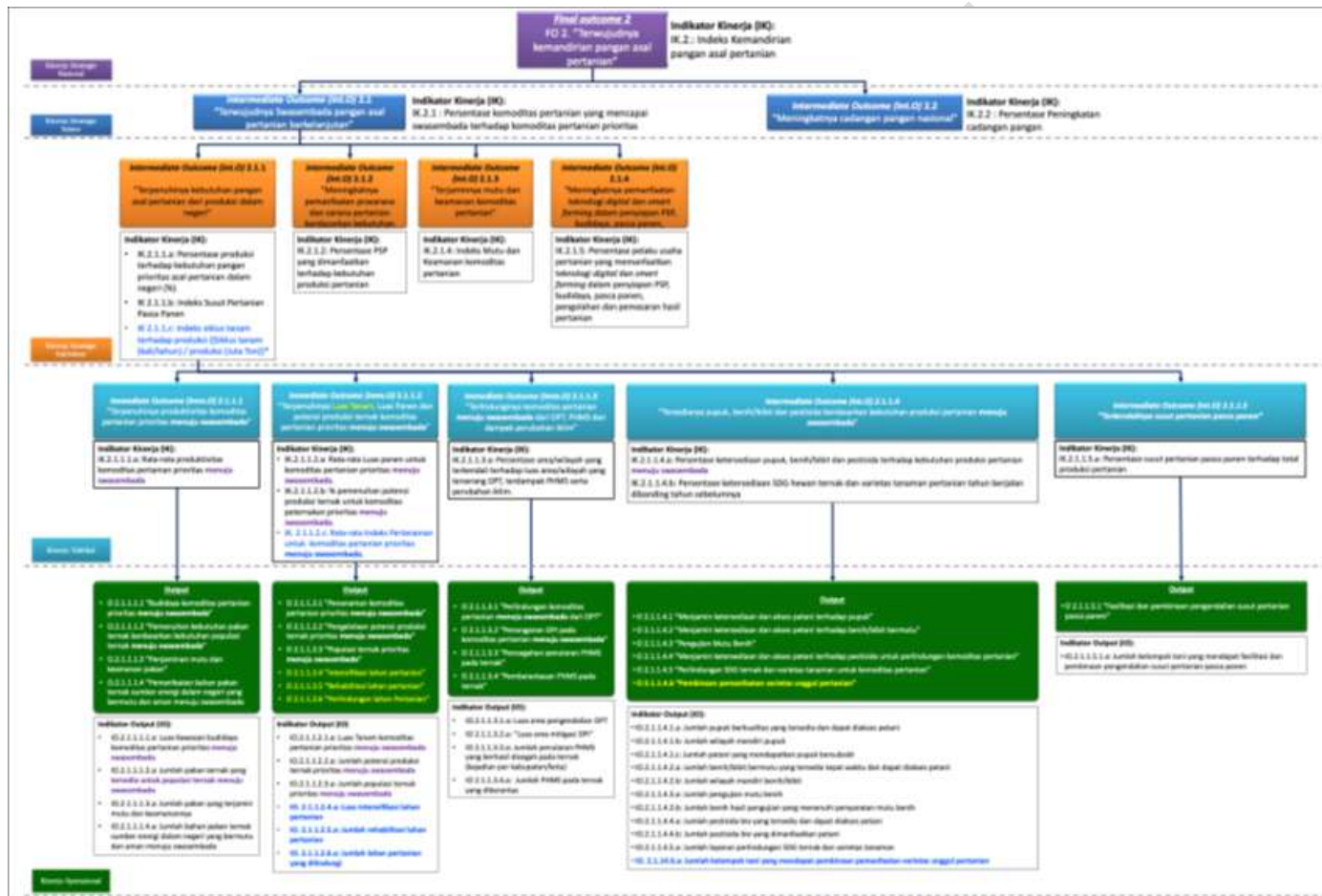
Melalui implementasi Renstra ini, Ditjen PKH berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Ditjen PKH siap menghadapi dinamika global dan lokal, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Renstra ini dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai kemajuan sektor peternakan dan kesehatan hewan yang lebih baik di masa depan.

Lampiran 1

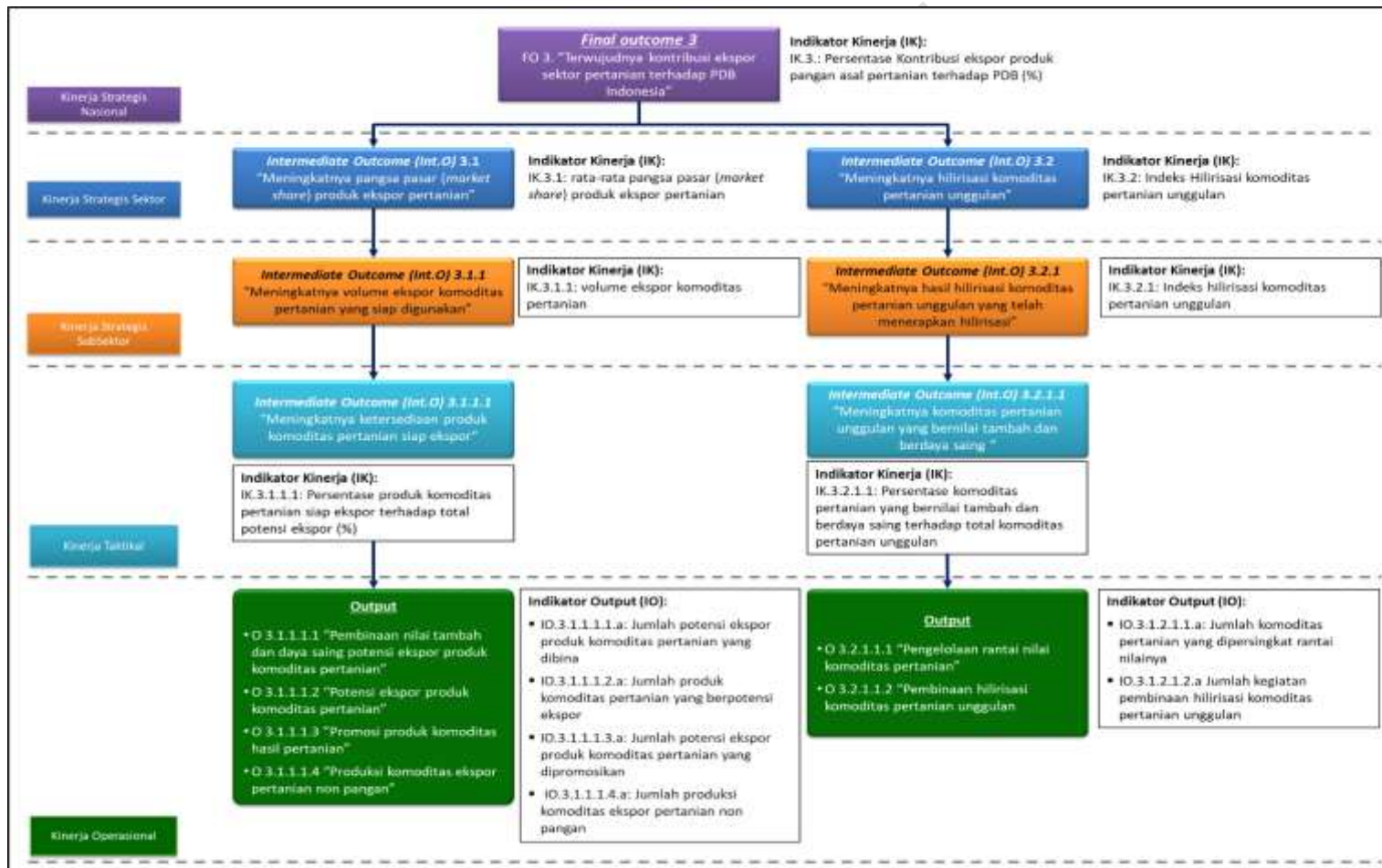
POHON KINERJA FO 1

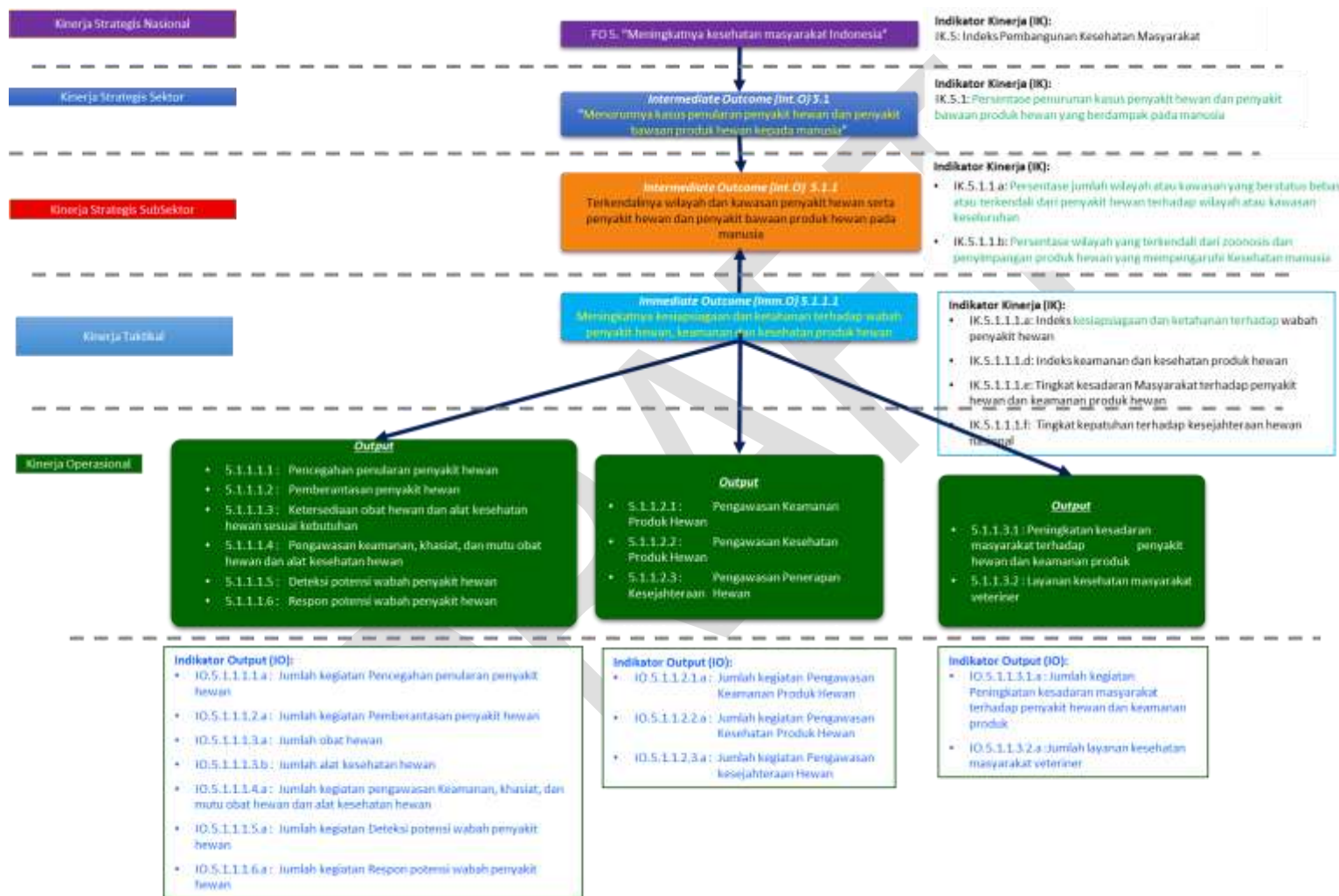


POHON KINERJA FO 2



POHON KINERJA FO3





PHON

POHON KINERJA FO 6

DRAFT